

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM

PERSPEKTIF *MAQASHID SHARIAH*

(Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi
pada Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Kartini

90400116095

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartini

NIM : 90400116095

Tempat/Tgl. Lahir : Ammani, 04 Juli 1999

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

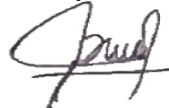
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif *Maqashid Shariah* (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, 25 November 2020

Penyusun,



Kartini
90400116095



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam perspektif *Maqashid Shariah* (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)”, yang disusun oleh Kartini, NIM 90400116095, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2020 bertepatan dengan 05 Rabiul Akhir 1442, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 08 Desember 2020
23 Rabiul Akhir 1442

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak	(.....)
Penguji I	: Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak	(.....)
Penguji II	: Dr. Ir. Idris Parakassi, MM.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA., Ak	(.....)
Pembimbing II	: Akramunnas, SE., MM.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamiin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemampuan dalam berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan shalawat juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi panutan sempurna dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Skripsi dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif Maqashid Shariah (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)”** dihadirkan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi(S.Ak) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dari awal hingga akhir dari proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Berbagai rintangan, tantangan, hambatan dan cobaan yang datang silih berganti. Ketekunan dan kerja keras yang disertai dengan doa menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Selain itu, adanya berbagai bantuan baik berupa dukungan moral maupun material yang mengalir dari berbagai pihak telah membantu memudahkan langkah penulis.

Secara khusus peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda **Syamsul** dan ibunda **Hamdana** yang telah mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, dan mendidik dengan sepenuh hati dilalui dengan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis, dan menjadi penyemangat penulis.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhanis, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan para pembantu rektor serta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Memen Suwandi, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Lince Bulutoding SE, M.Si. Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai Penguji I yang telah banyak memberikan masukan untuk skripsi ini.
5. Bapak Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA., Ak. selaku pembimbing 1 yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta nasihat yang baik dalam penyusunan skripsi ini hingga pada tahap penyelesaian.

6. Bapak Akramunnas, SE., MM. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta nasihat yang baik dalam penyusunan skripsi ini hingga pada tahap penyelesaian.
7. Dosen-dosen yang telah memberikan khazanah ilmu pengetahuan dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
8. Pihak informan dalam hal ini Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kasubag Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang serta Masyarakat yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian.
9. Saudaraku yang tak lain Karlina dan Muhammadil sunusi yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang, dan bantuan baik secara moril dan material demi kelancaran peneliti.
10. Tante Kasmiati dan Om Kamaruddin yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.
11. Sepupuku Sri Rindayani yang senantiasa selalu setia menemani, memberikan semangat, dan motivasi kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini sampai pada tahap penyelesaian.
12. Sahabat seperjuanganku Melinda Sari, Andi Naimah Syakir, Nurfadhillah Putri (PWK) dari mahasiswa baru hingga saat ini yang telah senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi hingga sampai pada tahap penyelesaian.
13. Kepada teman-teman dan kakak senior yang selalu berbagi informasi, bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

14. Teman-teman COASTER khususnya kelas Akuntansi C 2016 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menjalani tahapan-tahapan perkuliahan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi selama proses penyelesaian skripsi.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, penulis persembahkan skripsi ini sebagai upaya pemenuhan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada UIN Alauddin Makassar, dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datanginya dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah SWT adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan dan alam semesta beserta isinya adalah tempat dan narasumber terbaik untuk segala jenis riset kehidupan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis,



Kartini
90400116095

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Novelty Penelitian	11
F. Tujuan Penelitian	12
G. Manfaat Penelitian	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	15
A. Maqashid Shariah.....	15
B. Syariah enterprise theory (SET).....	20
C. Akuntabilitas	22
D. Anggaran	24
E. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam	27
F. Rerangka Pikir	30
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Metode Analisis Data	38

G. Teknik Analisis Data	38
H. Maqashid Shariah sebagai Alat Analisis Data	42
H. Uji Keabsahan Data.....	43
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	64
BAB V : PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Keterbatasan Penelitian	95
C. Implikasi Penelitian	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rerangka Pikir	31
Gambar 3.1	Model Analisis Data	40
Gambar 3.2	Alat Analisis Data.....	43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	47
Gambar 4.2	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.....	68
Gambar 4.3	Model Akuntabilitas.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	8
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1	Pengelolaan Anggaran Dinas Perikanan Kab. Pinrang	73
Tabel 4.2	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dinas Perikanan	78
Tabel 4.3	Analisis <i>Maqashid Shariah</i>	92



ABSTRAK

Nama : Kartini
NIM : 90400116095
Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif *Maqashid Shariah* (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengelolaan anggaran serta model akuntabilitas penganggaran yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian juga berusaha untuk mengelaborasi konsep *maqashid syariah* sebagai bagian dari acuan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini merupakan *qualitative research* dengan pendekatan paradigma kritis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari beberapa informan dan hasil observasi lapangan serta ditunjang dengan data-data literatur lainnya. yang dilakukan. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan metode *indepth interview*, observasi, studi dokumentasi, studi pustaka, dan perekaman. Kemudian, untuk menganalisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas berupa analisis triangulasi dan uji dependabilitas berupa analisis konsistensi, lalu membuat kesimpulan akhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan anggaran dinas perikanan telah terkelola dengan baik melalui prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan program-program yang dianggarkan oleh dinas perikanan kabupaten Pinrang. Akuntabilitas pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang fokus pada outcome yang dimulai dari input berupa bukti-bukti transaksi maupun dokumentasi kegiatan, proses berupa pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran, output berupa laporan pertanggungjawaban, serta outcome berupa kualitas kinerja yang dapat dinilai oleh pemerintah dan masyarakat. Meskipun terkadang pertanggungjawaban yang dilakukan tidak lengkap atau biasa terlambat dalam melakukan pelaporan akuntabilitas yang menimbulkan adanya kecurigaan bahwa ada beberapa informasi penting yang tidak disampaikan dalam pelaporan yang dibuatnya. Namun akuntabilitas telah dijalankan sesuai dengan lima prinsip dalam konsep *maqashid syariah* yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nas*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz an-nasb* meskipun terdapat beberapa kendala yang masih harus dibenahi guna menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik lagi kedepannya.

Kata Kunci: *Anggaran, Akuntabilitas, Maqashid Shariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran merupakan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang meliputi semua aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Menurut Basri (2013) anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak, serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran bukanlah proses yang berdiri sendiri, dikeluarkan dari saluran lain dari tindakan pemerintah (Adiwirya dan Sudana, 2015). Penganggaran yang baik didukung oleh, dan pada gilirannya mendukung, berbagai pilar pemerintahan modern publik: integritas, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dan pendekatan strategis untuk perencanaan dan mencapai tujuan nasional. Penganggaran demikian merupakan kunci penting dalam arsitektur kepercayaan antara negara dan warga negara dalam pengelolaan anggaran.

Membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) (Hamidi, 2014).

Perubahan sistem penganggaran di Indonesia ke sistem penganggaran yang berbasis kinerja merupakan faktor penting untuk mendorong dan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah dan dalam mendukung terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan prasyarat utama dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa (wowurantu dan Runtu 2014).

Penganggaran berbasis kinerja berorientasi bagaimana para pemimpin mendayagunakan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk saat ini, bagaimanapun inisiatif tersebut belum sistematis dinilai. Mengingat momentum yang sedang berlangsung di kalangan pengembangan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas inisiatif terkait anggaran penting untuk mengambil stok dan menentukan apakah inisiatif tersebut memungkinkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kewo, 2017). Menurut Lina dan Anisa (2017) pengelolaan anggaran di kabupaten jombang masih memerlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah agar akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan baik sehingga *good local government* dapat tercapai.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang menunjukkan terdapat banyaknya penyelewengan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di instansi-instansi pemerintah. Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan pengelolaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna anggaran. Penelitian hanifah (2015)

menunjukkan bahwa akuntabilitas anggaran di kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan akuntabilitas yang baik, tetapi dari sisi pencatatan akuntasinya masih membutuhkan pembinaan dan pelatihan karena belum sesuai dengan ketentuan. Pangumbalerang dan pinatik (2014) Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom.

Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD, dimana dalam penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif (Lontaan dan Pangerapan, 2016). Adanya otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing (Korompot dan poputra, 2015).

Tingkat akuntabilitas di Indonesia masih lemah sehingga perlu dilakukan suatu upaya perbaikan. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah telah memberikan

penghargaan atas akuntabilitas entitas (Afriyanti *et al.*, 2015). Anggriani *et al.* (2019) menunjukkan permasalahan mengenai akuntabilitas di desa Citalangar karena kurangnya keterbukaan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan anggaran serta kurangnya musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat sehingga akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan anggaran menjadi tertutup. Pada pemerintah kabupaten Blitar menunjukkan bahwa akuntabilitas telah terlaksana dengan baik, namun proses penganggaran secara manual masih rawan terjadinya penyimpangan karena masih tertutupnya proses penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Penganggaran telah berhasil di banyak Negara termasuk Selandia Baru, Australia, Singapura, Belanda, Norwegia, Swedia, Amerika Serikat, Kanada, Mauritius, Rwanda dan Afrika Selatan tetapi gagal pada Negara lain seperti Sri Lanka dan Thailand di Kanada misalnya, bahkan di mana ada kepemimpinan dan akuntabilitas yang jelas, penuh implementasi mengakibatkan perubahan nyata dalam budaya organisasi. Fenomena ini kemudian disikapi oleh pemerintah Kenya dengan membentuk sebuah sistem akuntabilitas penganggaran yang disebut dengan reformasi sistem penganggaran (Rotich dan Ngahu, 2015). Berbagai reformasi juga dilakukan di Negara lain seperti Rusia. Namun, Metode yang digunakan masih memiliki beberapa kelemahan, seperti pemahaman terkait akuntabilitas yang kurang dan pengawasan anggaran yang masih jauh dari kata maksimal (Klychova *et al.*, 2014).

Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama

disebabkan oleh dua faktor berikut ini yaitu: 1. Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. 2. Desentralisasifiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Aliya dan Nahar, 2012).

Menurut Hamidi (2014) Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip. Akuntabilitas pengelolaan anggaran baik itu anggaran dana desa yang di salurkan kesuruh daerah melalui SKPD haruslah merata demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akuntabilitas yang dilakukan dengan baik haruslah dilakukan sesuai undang-undang dan syariat atau prinsip islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran.

Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Baidhowi dan Zaki 2014).

Mursal dan Suhadi (2015) Menyatakan islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk

aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari'ah (hukum-hukum agama).

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram (Amalia, 2013). Prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat yang didasari dengan ketentuan agama islam yang diatur oleh Allah SWT. didalam Al-quran untuk tetap terus bersifat jujur dan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Prinsip islam akan mendasari jalan pemerintah yang baik untuk kemajuan Negara baik disektor publik.

Wina dan Khairani (2016) mengatakan setiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *Good Governance*. Salah satu prinsip strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Untuk menciptakan prinsip tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian laporan keuangan yang berlaku. Organisasi termasuk organisasi sektor publik perlu mengetahui kinerjanya untuk mengetahui hasil pencapaiannya. Organisasi sektor

publik merupakan organisasi yang menggunakan dana publik untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa publik. Sebagai organisasi yang menggunakan dana publik maka pemerintah perlu mengetahui bagaimana pengelolaan dananya (Fitriani, 2014). Menurut Purnama dan Nadirsyah (2016) Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Perguruan tinggi sebagai salah satu unit satuan kerja pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda dengan satuan kerja pemerintah pada umumnya. Kemudian karakteristik penerimaan yang dilakukan sebagai satuan kerja juga mempunyai karakteristik yang berbeda (Jaya, 2011). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif *Maqashid Shariah* (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian berfokus kepada bagaimana menciptakan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam agar tujuan dari hadirnya anggaran tersebut dapat dicapai secara maksimal. Tujuan tersebut merupakan wujud maksimalisasi pengelolaan anggaran yang notabeneanya memang ditujukan untuk sebaik-baiknya kepentingan masyarakat. Hal inilah yang kemudian memotivasi peneliti untuk mengintegrasikan konsep *maqashid shariah* kedalam konsep akuntabilitas agar kiranya tujuan kemaslahatan dan keberkahan dapat benar-benar terealisasi secara maksimal sesuai dengan tuntunan agama.

Tab 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus Penelitian
Pengelolaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pelaksanaan 4. Pengendalian
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input 2. Proses 3. Output dan Outcome
<i>Maqashid Shariah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hifdz ad-din</i> 2. <i>Hifdz an-nafs</i> 3. <i>Hifdz al-aql</i> 4. <i>Hifdz al-mal</i> 5. <i>Hifdz an-nasb</i>

C. Rumusan Masalah

Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikutinyaitu: 1. Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. 2. Desentralisasifiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran

anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang menunjukkan terdapat banyaknya penyelewengan ataupun penyimpanan dalam pengelolaan anggaran di instansi-instansi pemerintah. Merujuk pada latar belakang diatas, maka masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana model akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana pengelolaan anggaran yang akuntabel dalam perspektif *maqashid syariah* pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang?

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih meneliti dalam tinjauan umum tanpa menerapkan prinsip islam. Masyarakat berpandangan bahwa dengan meninjaunya secara umum dengan pendekatan hukum sudah lebih dari cukup. Hal ini kemudian menggerakkan peneliti untuk coba melihat bagaimana aparat melakukan akuntabilitas dengan menerapkan prinsip islam. Maksud digunakannya prinsip islam ini adalah untuk mengarahkan perilaku aparat kearah yang semestinya sesuai dengan nilai-nilai spiritual. Fenomena yang berkembang adalah terkadang manusia lebih patuh dengan hukum-hukum syariah dibandingkan dengan berbagai regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil penelitian
1.	Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang	Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
2.	Rizal <i>et al.</i> (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari Balimbing kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APB Nagari. Secara umum akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan dengan baik. Namun, masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabel dan transparan yang belum terpenuhi oleh pemerintah nagari Balimbing.
3	Nani <i>et al.</i> (2019)	Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif	Hasil Kajian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun masih kegiatan musyawarah dusun (Musdus) ini masih kurang efektif dikarenakan

				kurangnya sumber daya manusia dan juga kurangnya kesadaran masyarakat mengenai partisipasi dalam pengelolaan APBDes
4	Sultan (2014)	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif	Kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tingkat komprehensif dan disiplin keuangan, fleksibilitas, kejujuran, transparansi dan akuntabilitas untuk pembuatan MC (monthly certificate), SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung), SPP-GU (surat permintaan pembayaran belanja operasional), dan penerbitan SPMU (surat perintah membayar uang) terlaksana dengan baik
5	Binti Sa'adah (2015)	Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar)	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan transparansi anggaran yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, proses penganggaran secara manual masih rawan terjadinya penyimpangan anggaran. Selain itu, tertutupnya proses penganggaran yang dilakukan oleh TAPD dan Banggar rawan terjadinya penyimpangan.

E. Novelty Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep *maqashid syariah* yang didalamnya terdiri dari 5 asas pemeliharaan yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), dan *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan) yang akan di elaborasikan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan anggaran di dinas perikanan kabupaten pinrang. Menjadi penting untuk mengelaborasi kelima konsep tersebut kedalam pengelolaan anggaran dikarenakan selama ini anggaran menjadi produk

yang sensitive terhadap berbagai penyimpangan atau dengan kata lain rentang untuk disalahgunakan oleh pejabat birokrasi.

Konsep *maqashid syariah* dipilih dalam penelitian ini guna mengimplementasikan sifat wajib nabi yakni amanah, shiddiq, fathanah dan tablig guna meningkatkan level akuntabilitas pengelolaan anggaran di dinas perikanan kabupaten pinrang yang selama ini terbengkalai dikarenakan ketidakpahaman atau adanya kealpaan yang dilakukan oleh dinas perikanan kabupaten pinrang.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui model akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran yang akuntabel dalam perspektif *maqashid syariah* pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi landasan dan acuan dalam dalam pengelolaan anggaran pemerintah dengan konsep akuntabilitas dan prinsip islam. Hal tersebut telah tertuang dalam beberapa konsep

yang menjadi tanggung jawab dan berbagai tingkat kesadaran. Sebagaimana yang tersaji dalam pemaknaan rekonstruksi yang dimaknai sebagai pengembalian sesuatu tempatnya yang semula. Pertanggungjawaban vertikal (kepada Tuhan) dan pertanggungjawaban horizontal (kepada manusia dan lingkungan) merupakan dua hal yang ingin dicapai dengan aktualisasi *maqashid syariah*, yang merupakan sebuah perwujudan pertanggungjawaban yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan anggaran dapat disesuaikan dengan tujuan kemaslahatan yang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, merujuk pada pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah disertai dengan prinsip-prinsip islam dalam pelaksanaan penganggaran pada instansi pemerintah tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang komprehensif untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan akuntabilitas penganggaran.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi penggerak pelaksanaan akuntabilitas penganggaran yang baik, demi terwujudnya kesejahteraan sosial dalam bingkai *maqashid syariah*.

3. Manfaat Regulasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi aparatur pemerintah untuk lebih mengoptimalkan peranannya

dalam mengelola anggaran pemerintah dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas. diharapkan juga, dapat menjadi sumber informasi terkait penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah yang di atur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2016. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Maqashid Shariah*

Maqashid shariah merupakan tujuan untuk menuju sumber kehidupan. Beberapa ulama memaknai syariah sebagai agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan *mu'amalat* atau sisi hukum amal di dalam agama. Didalam Al-Qur'an Allah SWT. menyebutkan beberapa kata syari'at salah satunya yang ada dalam surat Al-Jasiyyah yang artinya “ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (Nabilah *et al.*, 2019). *Maqashid shariah* memiliki inti teori adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Berdasarkan tujuan *al-Syari'* bahwa tujuan awal penetapan hukum syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama (Sudrajat dan Sodiq, 2016). *Maqashid shariah* menyarankan agar diblokirnya sarana-sarana yang mengakibatkan terjadinya tujuan yang ilegal dan agar dibukanya sarana yang mengantarkan kepada tercapainya tujuan yang legal.

Maqahid shariah adalah tujuan (*al-ma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang diinginkan oleh Allah (*syari'*) dalam seluruh hukum (*tasyri'*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja. Tujuan (*al-ma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang diinginkan oleh Allah (*syari'*) dalam seluruh

hukum (*tasyri'*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja (Ghulam, 2016). Yumni (2016) mengatakan untuk memahami *maqashid syariah* perlu adanya metode ijtihad (Ijtihad istimbathi dan Ijtihad Munthabiqi) oleh karena itu *maqashid Syariah* ada keterkaitan antara Ijtihad, keterkaitan antara *maqashid syariah* dengan ijtihad adalah keterkaitan antara teori perumusan hukum dengan metodologi perumusan hukum-hukum Islam. Menurut Hartono (2018) Konsep *Maqashid Syariah* Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqihnya merumuskan konsep *maqashid syariah* dengan mengklasifikasikannya ke dalam lima tujuan utama yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (Memelihara jiwa) dan *hifdz al-aql* (Memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), dan *hifdz al-nasb* (memelihara keturunan)

1. *Hifdz ad-din* (Memelihara Agama)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama. Kedua, memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Ketiga, Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat,

yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2. *Hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Kedua, memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Ketiga, memelihara dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan.

3. *Hifdz al-aql* (Memelihara Akal)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan,

maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Kedua, Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. *Hifdz al-mal* (Memelihara Harta)

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, memelihara harta dalam peringkat dhururiyyat, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga, memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

5. *Hifdz an-nasb* (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, memelihara keturunan dalam

peringkat dhururiyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. Ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan.

Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. Konsep *maqashid syariah* ini kemudian dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan sifat wajib Nabi (*an-nubuwwah*), yakni *shiddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*. Keempat konsep ini juga memiliki beberapa barometer atau indikator pengukuran yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. *Shiddiq*

- a) Tidak ingkar janji dalam mewujudkan program dan pengelolaan
- b) Tidak menyembunyikan segala sesuatu terkait program dan pengelolaan

2. *Amanah*

- a) Menjalankan pengelolaan secara jujur dan bertanggungjawab
- b) Menjamin terlaksananya program secara maksimal.

3. *Fathanah*

- a) Memahami konsep akuntabilitas anggaran
- b) Memahami dan menjaga etika profesionalisme
- c) Kreatif, inovatif dan adaptif

4. *Tablig*

- a) Menjaga transparansi anggaran
- b) Menyajikan laporan keuangan secara wajar

B. *Shariah enterprise theory (SET)*

Sharia Enterprise Theory (SET) dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding ET. Sementara ET lebih mengedapankan sifat egoistiknya daripada sifat altruistik. *Shariah Enterprise theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada organisasi saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. *Shariah enterprise theory* merupakan teori yang dicetuskan oleh Prof. Iwan Triyuwono untuk pengembangan akuntansi syariah dimana merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi adalah Tuhan, manusia dan alam. *Shariah enterprise theory* adalah Allah SWT. sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT. yang didalamnya

melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Kalbarini, 2018).

Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran ke-Tuhan-an para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah (Fauzi, 2012).

Shariah Enterprise Theory mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah SWT., sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (khalifa fil ardhi). Manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah SWT. secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Kalbarini dan Suprayogi, 2014). Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ke-Tuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi

konstruksi akuntansisyari'ah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Tuhan. *Shari'ah enterprise theory* (SET) tepat digunakan sebagai dasar dalam penerapan operasional bank syari'ah terutama dalam penerapan dalam hal kinerja keuangan dan untuk menentukan kesesuaian antara pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perbankan syari'ah dengan konsep-konsep yang ada pada *Shariah enterprise theory* (SET) dalam memenuhi kinerja sosial. Karena dalam perbankan juga mengutamakan prinsip ketuhanan, keadilan, dan kebenaran (Wahyuni, 2013). Dengan begitu, diharapkan dapat melengkapi atau menyempurnakan dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang sebenarnya.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya (Sulfiati *et al.*, 2010). Menurut Pangumbalerang (2014) reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi fenomena global termasuk di Indonesia, sehingga menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk dibidang pengelolaan keuangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna mewujudkan tata kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi meliputi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas

hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil (Boy dan Siringoringo, 2009). Menurut Hamidi (2014) Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan anggaran yang baik itu, anggaran yang di salurkan keseluruh daerah melalui SKPD haruslah merata demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Penganggaran merupakan anggaran yang memperhatikan prioritas program dan kegiatan. Pada pelaksanaannya, dibutuhkan aspek akuntabilitas dan transparansi agar kualitas anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran (Adiwirya dan Sudana, 2015). Pertanggungjawaban penganggaran juga menyangkut masalah akuntabilitas pemerintah efisien dan efektif yang ditandai dengan *era new public* untuk mendorong pemerintahan yang baik mengembangkan pendekatan yang lebih sistimatis dan rasional terhadap pengelolaan anggaran.

Akuntabilitas memiliki tujuan ekonomi dan sosial, namun akuntabilitas Islam memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan ekonomi, politik, keagamaan dan sosial (Ahyaruddin dan Akbar, 2018). Artinya akuntabilitas menurut hukum ilahi Islam adalah cara untuk sumber kehidupan yang dalam pengertian teknis merujuk kepada sistem hokum sesuai dengan Al Qur'an dan hadist Epstein dan McFarlan (2011) mendefinisikan hukum Islam sebagai disiplin hermeneutik yang membahas dan menafsirkan wahyu melalui hadist. Al-Qur'an dan sunah mendefinisikan dengan jelas apa yang benar, jujur dan adil, apa yang menjadi

preferensi prioritas masyarakat, apa peran dan tanggung jawab organisasi, dan juga, dalam beberapa aspek, menguraikan standar akuntansi khusus untuk praktik akuntansi. Akuntabilitas sendiri selain dalam Al-Qur'an dan hadits, juga telah dijelaskan dalam *Shariah enterprise theory*. *Shariah enterprise theory* merupakan teori yang dicetuskan oleh Triyuwono untuk pengembangan akuntansi syariah dimana merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi adalah Tuhan, manusia dan alam. *Shariah enterprise theory* adalah Allah SWT. sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT. yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Kalbarini, 2018).

D. Anggaran

Menurut Basri (2013) Anggaran merupakan rencana keuangan yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Dalam konteks anggaran organisasi publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (Daniel, 2019). Anggaran bukanlah proses yang berdiri sendiri, dikeluarkan dari saluran lain dari tindakan pemerintah. Penganggaran yang baik didukung oleh, dan pada gilirannya mendukung, berbagai pilar pemerintahan modern publik: integritas, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dan pendekatan strategis untuk perencanaan dan mencapai tujuan nasional. Anggaran

didefinisikan sebagai ringkasan terperinci estimasi pengeluaran untuk suatu periode tertentu bersama dengan proposal untuk pembiayaan mereka (Rotich dan Ngahu, 2015).

Anggaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi daerah. Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*), transparansi APBD merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program pemerintah daerah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran dalam menjalankan program-programnya, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, dalam hal ini akuntabilitas menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah (Sukesti dan Alfasadun, 2010).

Pembuatan anggaran dilakukan dalam perencanaan operasional. Berdasarkan tujuan strategis, anggaran memecahkan masalah mendistribusikan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu pemerintah tujuan dan sasaran umum diatasi ketika melaksanakan perencanaan anggaran dan metode adalah: Membangun perasional dan keuangan yang efisien; perencanaan operasional yang efisien kegiatan keuangan dan ekonomi optimalisasi pemanfaatan sumber daya, pengurangan biaya produksi dan biaya perbaikan penganggaran dengan menetapkan standar biaya anggaran, yang efektif dan analisis varians (Klychova *et al.*, 2014). Dalam bentuk sederhana anggaran merupakan suatu dokumen yang

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Viali dan Retnani, 2013).

Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan pengelolaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna anggaran (Thoyib *et al.*, 1997). Anggaran (budget) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan direncanakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang (Julita, 2012). Aspek sumber daya manusia sebagai penyusun dan pelaksana anggaran haruslah dipertimbangkan karena anggaran akan dipengaruhi oleh perilaku manusia terutama bagi pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, apabila dalam penyusunan anggaran tidak memperhatikan salah satu pihak, atau komunikasi antara bawahan dan atasan kurang berjalan dengan baik, maka kemungkinan mengakibatkan sistem anggaran gagal dikarenakan adanya pihak yang kurang puas dengan anggaran yang telah disusun.

Peran spender melekat pada institusi pengguna anggaran. Sudut pandang spender secara alami menganggap pengeluaran anggaran sebagai manfaat daripada biaya. Hal ini dikarenakan spender menganggap diri mereka sebagai unit profesional penyedia layanan masyarakat yang dimandatkan oleh pemerintah (Reheul *et al.*, (2014). Sebagai spender, mereka adalah berusaha semaksimal mungkin menyediakan layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan

anggaran. Dengan kata lain, spender (Kementerian/Lembaga) melihat APBN sebagai manfaat dan cenderung membelanjakannya hanya dari kepentingan institusi tersebut tanpa memperhatikan sudut pandang institusi lain yang memiliki peran guardian. Pengelolaan anggaran rutin, sebagai berikut :

1. Suatu rencana yang sudah disahkan
2. Rencana bagian dari pada rencana keseluruhan yang berupa anggaran.
3. Kalkulasi dari pembiayaan kegiatan pemerintah.

E. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Akuntansi menurut perspektif Islam adalah semua tentang norma-norma positif dan membawa nilai-nilai keTuhanan (*self-transendent*) dalam kehidupan sehari-hari, mencari kehendak Allah SWT. dan mengikuti perintahnya dalam bentuk Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan akuntansi dan manajemen Islam bukan hanya duniawi dan yang berorientasi uang, tapi berusaha untuk mencari hadiah intrinsik jangka panjang, keberkahan Allah SWT. (Ahmed, 2012). Ulama berpendapat bahwa banyak karakteristik spiritualitas di tempat kerja adalah dasar tema Islam. Karakteristik dapat mencakup pembangunan masyarakat, kepedulian keadilan sosial dalam organisasi dan visi, dan kesetaraan suara (Kriger dan Seng, 2015). Nilai-nilai pelayanan, menyerah diri, kebenaran, amal, kerendahan hati, pengampunan, belas kasih, rasa syukur, cinta, keberanian, iman, kebaikan, kesabaran, dan harapan, dalam literature spiritualitas di tempat kerja yang dapat ditemukan tidak hanya dalam Al Qur'an, tetapi juga dalam sastra populer Islam, perdebatan filosofis dan mistik Islam esoteris, tasawuf.

Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Baidhowi dan Zaki 2014). Mursal dan Suhadi (2015) Menyatakan Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari'ah (hukum-hukum agama). Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram (Amalia, 2013). Prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat yang didasari dengan ketentuan agama islam yang diatur oleh Allah SWT. didalam Al-quran untuk tetap terus bersifat jujur dan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Prinsip islam akan mendasari jalan pemerintah yang baik untuk kemajuan Negara baik disektor publik maupun sektor swasta.

Membangun sebuah gerakan yang mendorong terwujudnya akuntabilitas, yaitu lahirnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban anggaran tidak mesti dilakukan oleh kalangan NGO. Masih banyak elemen di negara ini yang sebenarnya juga bisa melakukan gerakan advokasi seperti itu. seperti elemen dari Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan atau yang biasa disebut Ormas. Oleh karena berbasis ormas Islam, maka di bagian dua menjelaskan visi misi agama Islam Dalil-dalil Al-quran maupun hadist yang menjadi dasar hukum untuk penganggaran diungkapkan secara jelas. Bukan hanya itu, selain menjelaskan konsepsi teoritis anggaran dan penganggaran. Anggaran dan penganggaran, pengelolaan keuangan negara dan daerah, hingga bagaimana alur atau proses penyusunan anggaran mulai dari tingkat yang paling bawah hingga pusat. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran mengetahui proses pengelolaan anggaran, sejauh anggaran yang telah dialokasikan tersebut dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai perencanaan. Oleh karena itulah, pertanggungjawaban anggaran juga diulas. Akuntabilitas Islam bukan hanya duniawi dan yang berorientasi uang, tapi berusaha untuk mencari keberkahan Allah SWT. Spiritualisme merupakan kecenderungan paling besar abad 21 sehingga sering disebut sebagai Abad Baru (*New Age*), yaitu Abad Spiritual (*Spiritual Age*). Pada abad ini, berbeda dengan abad sebelumnya, timbul kecenderungan dan kegandrungan manusia pada hal-hal yang bersifat rohani (spiritual) dan mistik (agamis) (Prasetio, 2017).

Sistem-sistem akuntansi yang terpenting untuk iman seorang Muslim adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT. dan masyarakat akuntansi bertanggung jawab atas sumber daya ekonomi yang dikelolanya terlepas dari apakah transaksi dan sumber daya tersebut adalah orang-orang dari sebuah

organisasi pemerintah atau badan swasta. Fungsi pelayanan ini telah menjadi aktivitas manusia yang terorganisir dari awal. Ayat yang mengenai penelitian ini yaitu QS Al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

Terjemahannya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk tidak menyembunyikan kebenaran, karena Allah SWT. akan memberikan balasan setiap perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini untuk memperbaiki pengelolaan anggaran pemerintah maka penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah menjadi sangat penting dalam menjamin upaya pemanfaatan aset desa bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Indonesia.

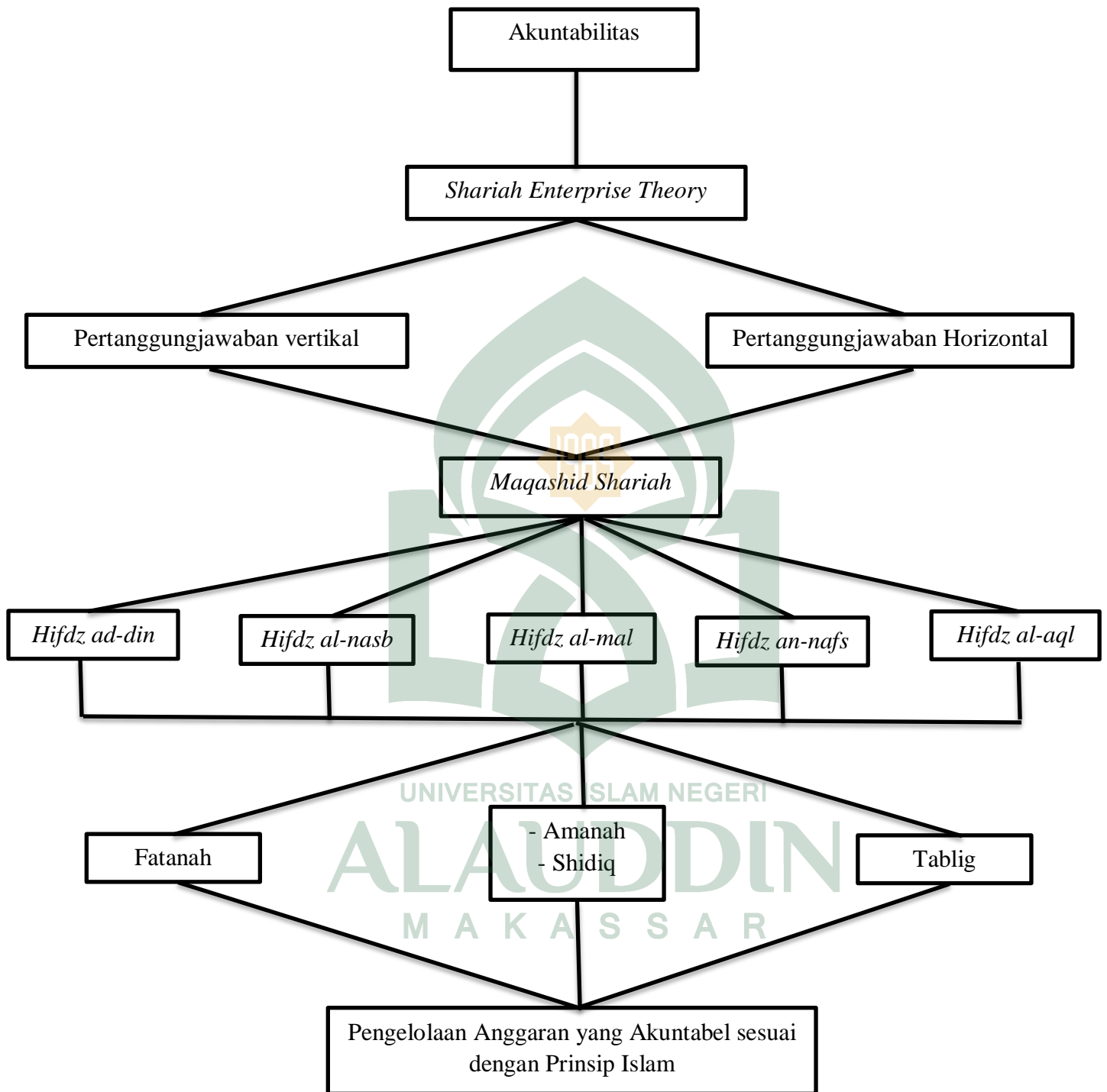
F. Rerangka Pikir

Akuntabilitas merupakan sikap tanggungjawab berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip. Akuntabilitas pengelolaan anggaran baik itu anggaran dana desa yang di salurkan kesuruh daerah melalui SKPD haruslah merata demi kesejahteraan

masyarakat Indonesia. Akuntabilitas jika dilihat dari padangan islam, bukan hanya duniawi dan yang berorientasi uang, tapi berusaha untuk mencari keberkahan Allah SWT. Diterapkannya prinsip islam sikap jujur dan amanah akan menghasilkan yang penganggaran dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dalam instansi pemerintah.

Rerangka pikir merupakan sebuah pakem atau gambaran singkat yang memberikan informasi mengenai model dan alur penelitian. Dalam rerangka pikir, segala bentuk komponen penyusun penelitian ditampilkan secara simbolik dan disajikan dalam bentuk bagan sistematis dan bertujuan khusus. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian yang dilakukan pada dinas perikanan dengan objek penelitian akuntabilitas pengelolaan anggaran. Penelitian ini ditunjang dengan *Shariah enterprise theory* dan grand concept *maqashid syariah*. Ending penelitian ini adalah bagaimana kemudian *maqashid syariah* dapat memaksimalkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Berikut disajikan kerangka konseptual dari penelitian ini.

Gambar 2.1 Gambar Rerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: masalah penelitian belum jelas (masih samar atau mungkin masih gelap), untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan untuk meneliti sejarah perkembangan (Nurul, 2016; Azmi *et al.*, 2018). Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Bungin, 2003:41).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Atmadja, 2013). Alasan yang utama dari pemilihan jenis penelitian kualitatif adalah kemauan dari diri sendiri untuk lebih memahami bagaimana meninjau penerapan *maqashid shariah* dalam

memaksimalkan akuntabilitas pada pemerintah kabupaten melalui pendekatan fenomenologi dengan ditunjang dengan *shariah enterprise theory*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Perikanan yang berlokasi di Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini karena kabupaten Pinrang memiliki sektor perikanan yang potensial, yang syarat akan pengelolaan anggaran. Selain itu, aksesibilitas data dan informasi menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Pendekatan ini mendeskripsikan tentang pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena (Laily, 2013). Seperti yang diungkapkan oleh Kasali (2008) bahwa fenomenologi adalah gagasan mengenai dunia kehidupan, pemahaman bahwa realitas masing-masing individu itu berbeda, dan bahwa tindakan masing-masing individu hanya dapat dipahami melalui pemahaman terhadap kehidupan individu, sekaligus melalui perspektif mereka bersama. Dalam pendekatan fenomenologi, pemaknaan-pemaknaan itu berlangsung dalam kesadaran individu sehingga mereka yang lebih sering mengalami dalam keseharian (*everyday life*) akan memberi pemahaman yang lebih banyak. Dalam hal ini, pendekatan fenomenologi diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penerapan *maqashid syariah* pada penggunaan anggaran pemerintah untuk memaksimalkan akuntabilitas.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh melalui responden penelitian yang di-*interview* dan didokumentasikan. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013: 145) data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau sekelompok yang menjadi subjek penelitian (responden).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari sumber aslinya tanpa media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2013: 142). Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013: 148). Adapun sumber data primer penelitian diperoleh dari informan yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah Daerah, informasi-informasi tentang anggaran, dan data-data lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Menganalisis dan menginterpretasikan suatu data dengan baik, diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan dapat mendeskripsikan kondisi suatu objek yang sedang diteliti dengan benar. Berangkat dari hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,

wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan *internet searching*. Kelima metode dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara maksimal.

1. Observasi

Sugiyono (2014:78), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan. Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis perilaku aparaturnya pemerintah daerah Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara

Dokumentasi Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self – report* atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Metode wawancara yang digunakan adalah *indepth interview* sehingga peneliti menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat. Proses mendokumentasikan data-

data penelitian merupakan sebuah langkah untuk *memback-up* informasi yang telah didapatkan. Dokumentasi ini dapat berbentuk file foto, video, atau file rekaman wawancara yang dapat diakses dari *server* atau *database* yang dibuat sendiri atau terpublikasi di situs-situs yang kredibel. Selain itu, catatan-catatan kecil saat wawancara yang dibuat oleh peneliti juga dapat dikategorisasikan sebagai bentuk dokumentasi.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti menghimpun informasi-informasi penunjang dari berbagai sumber kredibel. Informasi-informasi ini dapat diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, literatur singkat, buku-buku, ataupun sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

5. Internet Searching

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat untuk memperoleh data, yang diperlukan peneliti sudah melakukan pengumpulan informasi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti mencari informasi yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber seperti jurnal-jurnal penelitian, artikel, buku, data dari internet, dan sumber

referensi lainnya. Informasi yang telah didapatkan kemudian diolah menjadi data penelitian. Selain itu, peneliti juga harus menyediakan perlengkapan seperti alat tulis, *recorder*, dan hal-hal lain yang kiranya dapat menunjang penelitian.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama analisis data adalah menyediakan informasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 2013: 197). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Peneliti akan membangun kesimpulan penelitian dengan mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat dalam data-data tersebut. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian akan menjadi pihak yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian ini. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ialah sebagai berikut:

1. *Handphone/ Laptop*
2. Buku, Jurnal, Alat Tulis
3. Instrumen Pendukung lainnya

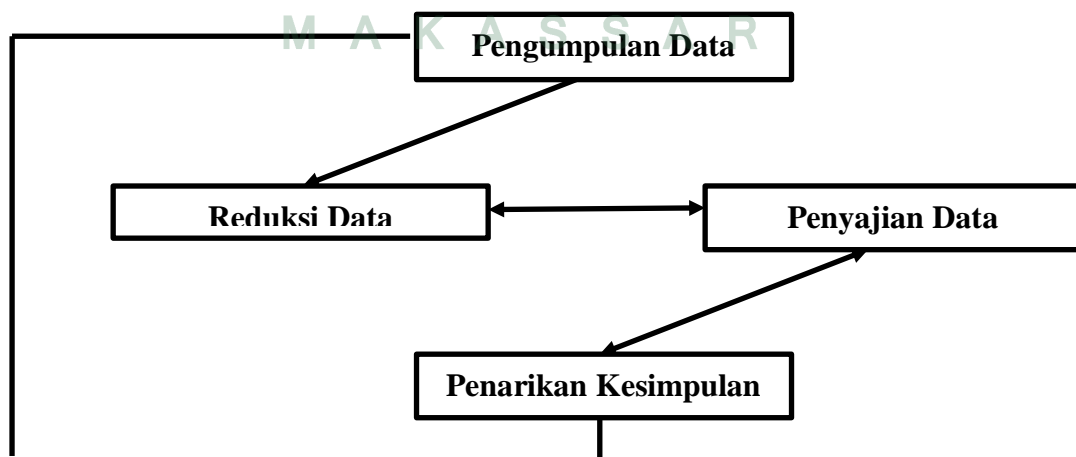
G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk didalamnya alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan bahwa penelitian kualitatif terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda,

seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak lata-kata daripada angka-angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan.

Proses analisis data yang dilakukan dengan menggunakan tiga kegiatan analisis. Miles dan Huberman mengemukakan tiga kegiatan dalam analisis data. *Pertama*, tahap reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tulisan lapangan yang berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. *Kedua*, data *display* yaitu kegiatan dimana data yang berupa kumpulan informasi telah tersusun dalam bentuk teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau. *Ketiga*, kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis Miles dan Huberman. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data *display* data dan penarikan kesimpulan berikutnya.

Gambar 3.1 Model Analisis Data



1. Reduksi Data

Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data dapat dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diajukan pada rumusan masalah dan data yang relevan atau sesuai dengan menganalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan atau kurang sesuai disisihkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data perlu dilakukan dalam sebuah penelitian sebab, biasanya informasi-informasi yang didapatkan peneliti bersifat naratif, sehingga dibutuhkan penyederhanaan penyederhanaan namun tanpa mengurangi isi dari data yang didapatkan. Penyajian data dilakukan guna memungkinkan terjadinya penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penyajian data penerapan Fintech dengan penyajian disederhanakan atau dengan penyajian informasi-informasi yang sederhana, namun tidak mengurangi isi dari informasi-informasi yang didapatkan, maksudnya adalah tujuan atau makna yang ada pada informasi tersebut tidak hilang ataupun dikurangi.

3. Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang

diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Penentuan sampel dipilih secara *purposive-sampling*, yaitu dengan menentukan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang makanan yang melakukan pembayaran pajak yang dimana usaha tersebut memiliki dampak baik positif maupun negatif terhadap masyarakat sekitar. Tujuan dari menganalisa data adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, analisa data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga karakteristik data dapat dipahami. Serta membuat suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi.

Adapun prosedur dari analisis data adalah sebagai berikut:

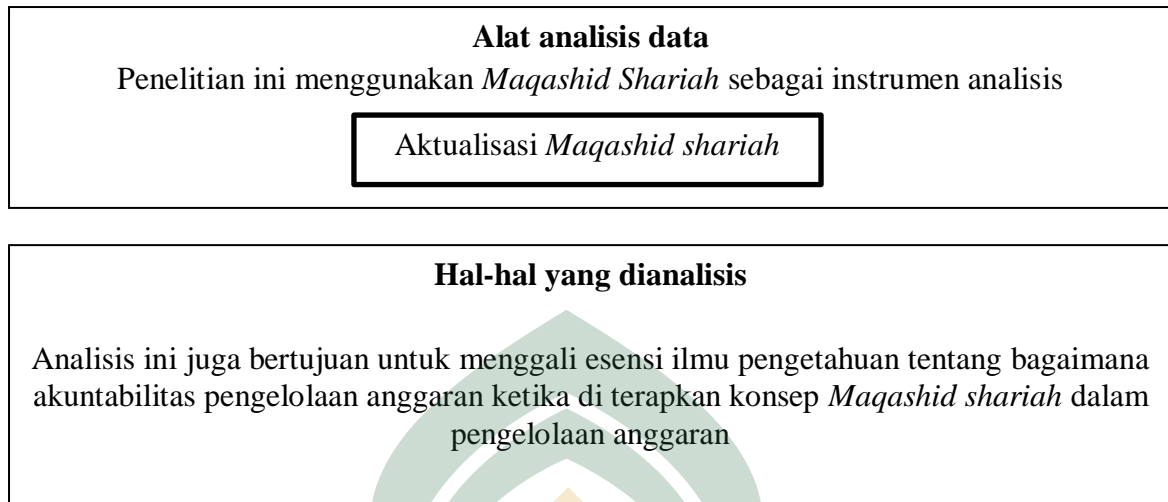
1. Tahap pengumpulan data melalui instrumen dari pengumpulan data.
2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data.
3. Tahap pengkodean, proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap pertanyaan yang terdapat didalam instrumen pengumpulan data.
4. Tahap pengujian data, yaitu menguji validitas dan reabilitas instrumen pengumpulan data.
5. Tahap penyajian data, dengan merangkai dan menjadikan satu kesatuan agar dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang kelengkapan untuk mendapatkan hasil yang valid.

H. Maqashid Shariah sebagai Alat Analisis Data

Maqashid shariah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh pemberi hukum, digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan (Muchlis dan Sukirman, 2016). Tujuan penetapan hukum atau yang dikenal dengan istilah *maqashid shariah* memiliki inti teori adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat (Sudrajat dan Sodik, 2016).

Didalam Al-Qur'an Allah SWT. menyebutkan beberapa kata syari'at salah satunya yang ada dalam surat Al-Jasiyyah yang artinya " Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui" (Nabilah *et al.*, 2019). Berdasarkan tujuan *al-Syari'* bahwa tujuan awal penetapan hukum syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama (Sudrajat dan Sodik, 2016). *Maqashid shariah* menyarankan agar diblokirnya sarana-sarana yang mengakibatkan terjadinya tujuan yang ilegal dan agar dibukanya sarana yang mengantarkan kepada tercapainya tujuan yang legal.

Gambar 3.2 Alat Analisis Data



Instrumen analisis, yang menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengetahui bagaimana sistem penganggaran di pemerintah. *Maqashid shariah* diharapkan dapat memaksimalkan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah, agar akauntabilitas tersebut dapat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang sebenarnya.

I. Uji Keabsahana Data

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam penelitian sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendekatan filosofis dan metodologis terhadap penelitian sosial. Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan melalui empat uji, yaitu *credibility* (validitas internal), *transfertility* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Adapun penelitian ini hanya menggunakan dua uji yang paling sesuai, yaitu *credibility* dan *dependability*. Alasan digunakannya empat uji ini adalah untuk menjamin kualitas data yang ditemukan di lapangan.

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas disebut juga dengan uji validitas internal pada penelitian kuantitatif, dimana kredibilitas ini dapat dicapai dengan kemampuan peneliti untuk berbaur dengan responden dalam waktu lama dengan terus melakukan konfirmasi-konfirmasi (Afiyanti, 2008). Data yang valid dapat Triangulasi Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada.

- a) Triangulasi Sumber data, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Triangulasi metode, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui sumber data utama yaitu *annual report*, peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti berita-berita terkait aktivitas Pelaporan Keuangan di berbagai media. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. Uji Dependabilitas

Uji realibilitas penelitian kualitatif dikenal dengan uji dependabilitas. Uji ini merupakan ujian atau pertimbangan keilmiah suatu penelitian kualitatif. Pertanyaan mendasar berdasarkan isu realibilitas adalah terkait konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda pula, tetapi dilakukan dengan metode dan *interview script* yang sama (Afiyanti, 2008). Dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan tindakan terstruktur yang memungkinkan peneliti lain menemukan hasil yang sama terhadap penelitian serupa. Adapun uji dependabilitas yang digunakan adalah uji konsistensi, yang dapat diukur dengan melihat apakah *interview scripts* yang digunakan peneliti dapat menghasilkan jawaban/hasil yang sesuai dengan topik atau pertanyaan yang diberikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Pinrang. Institusi pemerintah ini berganti nama menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang yang sebelumnya bernama Dinas eksplorasi Laut dan Perikanan, berdasarkan peraturan pada daerah tersebut.

Tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang berganti nama menjadi Dinas Perikanan kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perikanan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi pada setiap pekerjaannya. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi sebuah perusahaan maka struktur organisasi memegang peranan yang sangat penting, sebab itu dapat di katakan bahwa struktur organisasi merupakan salah satu syarat dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan bersangkutan yang sangat efektif dan efisien.

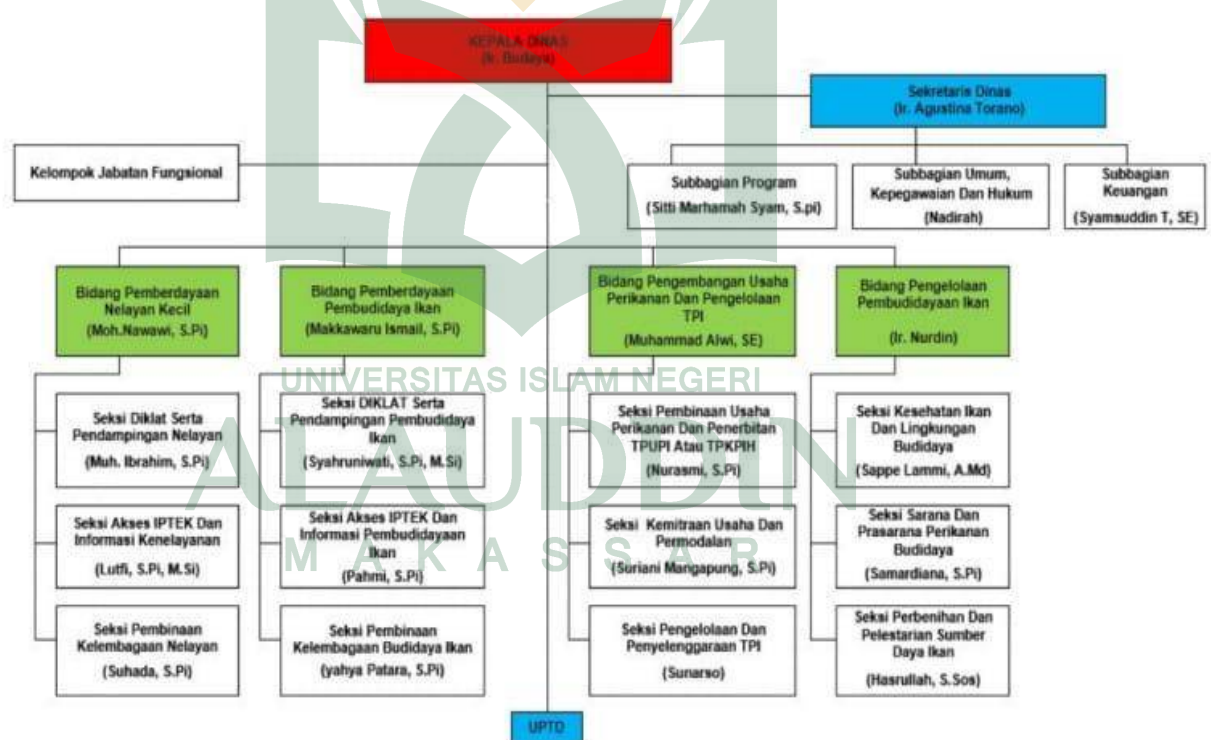
Adapun fungsi dibuatnya struktur organisasi antara lain :

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi.
2. Untuk mempertegas kedudukan dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi.
3. Untuk mengetahui jabatan yang ada serta tingkatan masing-masing jenjang kepegawaian dalam struktur organisasi.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat struktur organisasi yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten pinrang sebagai berikut :

❖ Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepada kepala dinas untuk melaksanakan tugas. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang Perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang Perikanan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Perikanan;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan setiap koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi saat penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup Dinas;

- c. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam lingkup Dinas;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

3. Sub-bagian Program

Sub-bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub-bagian yang mempunyai tugas yaitu membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan serta melakukan penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub-bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub-bagian Program;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan pada Sub-bagian Program;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi Sub-bagian Program; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

4. Sub-bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

Sub-bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub-bagian yang mempunyai tugas yaitu membantu Sekretaris untuk mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan,

pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub-bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub-bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan pada Sub-bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi Sub-bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

5. Sub-bagian Keuangan

Sub-bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub-bagian yang mempunyai tugas yaitu membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub-bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub-bagian Keuangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan pada Sub-bagian Keuangan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi Sub-bagian Keuangan

- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

6. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan di Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan di Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan di Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

7. Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Nelayan

Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Nelayan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan serta Pendampingan Nelayan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Nelayan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Nelayan;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Nelayan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Nelayan dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

8. Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan

Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam memfasilitasi pelaksanaan setiap kegiatan Akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi Nelayan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan;

- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

9. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan

Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan Kelembagaan Nelayan kecil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

10. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan

Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan di Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan di Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan di Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

11. Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Pembudidaya Ikan

Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Pembudidaya Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan serta Pendampingan Pembudidaya Ikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Pembudidaya Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Pembudidaya Ikan;

- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Pembudidaya Ikan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan Pembudidaya Ikan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

12. Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pembudidayaan Ikan

Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam memfasilitasi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi kepada Pembudidayaan Ikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pembudidayaan Ikan;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pembudidayaan Ikan;

- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pembudidayaan Ikan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

13. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pembudidaya Ikan

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pembudidaya Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pembudidaya Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pembudidaya Ikan;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pembudidaya Ikan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pembudidaya Ikan, dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

14. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas yaitu membantu

Kepala Dinas dalam melakukan Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

15. Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam memfasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan

Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atau Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan atau Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

16. Seksi Kemitraan Usaha dan Permodalan

Seksi Kemitraan Usaha dan Permodalan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam memfasilitasi Kemitraan Usaha dan Fasilitas Permodalan bagi pelaku usaha perikanan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Kemitraan Usaha dan Permodalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Kemitraan Usaha dan Permodalan;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan Seksi Kemitraan Usaha dan Permodalan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Kemitraan Usaha dan Permodalan.
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan dan fungsinya masing-masing.

17. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

18. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

19. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
- b. Pembinaan, Pengoordinasian, Pengendalian dan Pengawasan program serta kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

20. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;

- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

21. Seksi Perbenihan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan

Seksi Perbenihan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan sarana Perbenihan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Perbenihan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program serta kegiatan Seksi Perbenihan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan;
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program serta kegiatan Seksi Perbenihan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program serta kegiatan Seksi Perbenihan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

22. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri

- Kelompok Jabatan Fungsional.

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- Kelompok jabatan fungsional dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang telah disepakati oleh anggota kelompok lainnya.
- Pengangkatan tenaga fungsional dan ketua kelompoknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang

❖ Visi

Gambaran atau pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan kemana dan bagaimana instansi Pemerintah akan dibawa agar dalam berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

❖ Misi

Untuk mengantisipasi program / kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang agar tetap eksis, maka dalam pelaksanaan program senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait dan konsisten serta berkesinambungan sehinggadapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada capaian hasil dan manfaat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang

Anggaran merupakan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis dan terorganisir dalam bentuk angka yang meliputi semua aktivitas/program yang akan dilakukan oleh instansi untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak, serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran bukanlah proses yang berdiri sendiri, dikeluarkan dari saluran lain dari tindakan pemerintah. Penganggaran yang baik didukung oleh, dan pada gilirannya mendukung, berbagai pilar pemerintahan modern publik: integritas, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dan pendekatan strategis untuk perencanaan dan mencapai tujuan nasional. Penganggaran demikian merupakan kunci penting dalam arsitektur kepercayaan antara negara dan warga negara dalam pengelolaan anggaran. Olehnya itu, penting kemudian bagi instansi untuk membentuk pola penganggaran yang efektif dengan melibatkan seluruh elemen yang terkait dengannya. Penganggaran pada dasarnya memiliki empat poin penting yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dan hal ini pun dijabarkan dalam bahasan berikut ini:

a. Perencanaan

Perencanaan anggaran yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan organisasi sehingga fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik. Perencanaan anggaran yang menyeluruh ini dikenal dengan istilah *budget komprehensif* yang

terdiri dari anggaran penaksiran, anggaran variabel, analisis statistik, dan laporan anggaran. Membuat perencanaan anggaran untuk suatu program organisasi merupakan pekerjaan yang paling memakan waktu. Seringkali kita berpikir bahwa anggaran adalah format keuangan sederhana yang dilampirkan pada proposal program dan hanya perlu diisi sesuai dengan aktivitas program dan strategis yang telah dilakukan. Namun, ketika dilakukan analisis pada program yang sedang berjalan, peneliti menyadari bahwa anggaran adalah komponen penting dari suatu program.

Dinas Perikanan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah dengan potensi strategis di Kabupaten Pinrang, tentunya membutuhkan anggaran yang tidak kecil mengingat posisi geografis pinrang yang berada tepat di bibir selat Makassar. Kondisi tersebut kemudian membuat pemerintah Kabupaten Pinrang harus bisa membuat rancangan anggaran dan biaya (RAB) guna memaksimalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Pinrang. Merujuk pada hal tersebut perencanaan anggaran untuk perikanan harus dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkup pemerintahan Kabupaten Pinrang dan disesuaikan dengan berbagai regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Perencanaan program Dinas Perikanan pun harus dilakukan secara terstruktur. Hal ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh PLT kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang ;

“Penganggaran di Dinas Perikanan ini dimulai dari usulan musrembang, dimasukkan di tingkat kecamatan kabupaten, apa yang diusulkan di masyarakat di proses ke kabupaten. Setelah itu tim anggaran memerinci berapa anggaran yang dibutuhkan untuk

kegiatan itu.” (Ir. Agustina Torano, PLT Kepala Dinas Perikanan Kab. Pinrang)

Merujuk pada penyampaian PLT kepala Dinas Perikanan tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya penganggaran tidak serta merta dilakukan secara statis oleh Dinas Perikanan secara sepihak, namun direncanakan secara dinamis mulai dari level masyarakat sampai dengan level kabupaten. Pernyataan tersebut juga relevan dengan apa yang disampaikan oleh kasubag keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang;

“Betul itu disesuaikan dengan usulan masyarakat untuk kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh bidang tersebut. Dalam setiap bidang harus ada administrasinya.” (Syamsuddin Tappe, SE., Kasubag Keuangan Dinas Perikanan Kab. Pinrang)

Pernyataan kasubag keuangan tersebut menyiratkan adanya penganggaran yang dinamis yang disesuaikan dengan masukan masyarakat namun harus tetap sesuai dengan protokol administrasi yang nantinya akan dirapatkan bersama oleh lingkup birokrasi di Kabupaten Pinrang. Guna mengecek validitas informasi yang disampaikan oleh informan sebelumnya terkait dengan pengelolaan penganggaran yang dilakukan oleh Dinas Perikanan, peneliti kemudian mencoba mengkonfirmasi kepada salah satu warga yang mempunyai usaha yang bergerak di bidang perikanan ;

“Iya dek, memang itu pak kadis selalu turun disini untuk mengecek kondisinya kita ini yang bergerak di bidang perikanan. Setelah itu beliau juga biasanya mengajak kami berdiskusi terkait dengan program apa yang harus di buat oleh dinas perikanan. Intinya disini kami selaku masyarakat selalu dilibatkan dalam pembuatan program di dinas perikanan.” (Saiful, Masyarakat)

Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut kita dapat berkesimpulan bahwasanya Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah melakukan pengelolaan penganggaran secara bertanggungjawab sesuai dengan apa yang di jelaskan didalam *shariah enterprice theory* yakni mengedepankan amanah dan pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholder* mulai dari level paling atas atau dalam hal ini Bupati Kabupaten Pinrang hingga ke level terbawa yakni lapisan masyarakat khususnya yang terkait dengan sektor perikanan. Hal tersebut menjadi perwujudan tanggungjawab horizontal kepada sesama umat manusia dan secara tidak langsung kepada lingkungan alam yang bermuara kepada pertanggungjawaban vertikal dalam bentuk penjagaan amanah sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

Terjemahannya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia wajib bertanggungjawab atas segala sesuatu terutama amanah yang di embannya, dalam hal ini menjalankan pengelolaan anggaran pemerintah dalam upaya menjamin pemanfaatan aset negara bagi sebesar besarnya kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pinrang. Disamping itu Dinas Perikanan

Kabupaten Pinrang juga mempertegas bahwa mereka telah mengelola anggaran secara transparan dengan bersedia memberikan ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran kepada peneliti yang dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini;

Gambar 4.2 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah						Halaman 2	
KABUPATEN PINRANG Tahun Anggaran 2018						Formulir DPA - SKPD	
Urusan Pemerintahan		2.05	Kelautan dan Perikanan				
Organisasi		2.05.01	DINAS PERIKANAN				
Kode Rekening	Uraian					Jumlah (Rp)	
1	2					3	
4			PENDAPATAN				
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH			90.000.000,00	
4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			90.000.000,00	
5			BELANJA			16.419.310.383,00	
5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG			5.419.310.383,00	
5	1	1	BELANJA PEGAWAI			5.419.310.383,00	
5	2		BELANJA LANGSUNG			11.000.000.000,00	
5	2	1	BELANJA PEGAWAI			181.434.000,00	
5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA			10.347.307.500,00	
5	2	3	BELANJA MODAL			471.258.500,00	
Surplus / (Defisit)						(16.329.310.383,00)	
PEMBIAYAAN							
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					0,00	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					0,00	
Pembiayaan Neto						0,00	
Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan							
Uraian		Triwulan				Jumlah	Jumlah Thn.2019
		I	II	III	IV		
PENDAPATAN		20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	90.000.000,00	
PENDAPATAN ASLI DAERAH		20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	90.000.000,00	
BELANJA		4.932.041.226,00	4.400.860.350,00	4.860.780.195,00	3.426.668.713,00	16.419.310.383,00	
BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.384.927.800,00	1.384.927.800,00	1.384.927.800,00	1.384.927.800,00	6.419.310.383,00	
BELANJA LANGSUNG		2.877.213.625,00	3.046.132.850,00	3.206.922.600,00	2.079.731.125,00	11.000.000.000,00	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pinrang, 31 Januari 2018
Menyetujui
SEKRETARIS DAERAH
H. ISLAMUDDIN, SH. MH.
NIP. 19591003198011002

PERINTAHAN KABUPATEN
PINRANG

SETDA
H. ISLAMUDDIN, SH. MH.
NIP. 19591003198011002

Dari data tersebut kita dapat mengetahui program apa saja yang dibuat oleh dinas perikanan kabupaten pinrang beserta anggaran biaya yang dialokasikan untuk program tersebut. Data tersebut juga menjadi indikasi adanya keinginan untuk membangun suatu sistem penganggaran berbasis program yang dapat

memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Perubahan sistem penganggaran di Indonesia ke sistem penganggaran yang berbasis kinerja merupakan faktor penting untuk mendorong dan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah dan dalam mendukung terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan prasyarat utama dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Pengorganisasian merupakan suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan seperti penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian Pengorganisasian sama pentingnya dengan perencanaan karena dalam pengorganisasian seluruh sumber baik berupa manusia maupun nonmanusia harus diatur sedemikian rupa untuk berjalannya suatu instansi dalam pencapaian tujuan. Terkait dengan hal tersebut, keseluruhan *organizing* anggaran di Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik karena telah disampaikan pula kepada masyarakat. Hal ini merujuk kepada apa yang dikatakan oleh PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang;

“Pertanggungjawaban yang dilakukan juga diberikan juga kepada masyarakat. Proses anggarannya menunggu usulan musrembang dari masyarakat, terus di proses di kecamatan selanjutnya di proses di kabupaten, hasil dari kabupaten di rangkum di BKUD kemudian

di bagikan kepada setiap dinas.” (Ir. Agustina Torano, PLT Kepala Dinas Perikanan Kab. Pinrang)

Apa yang disampaikan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan didalam *shariah enterprise theory* yang dicetuskan oleh Prof. Iwan Triyono untuk mengembangkan akuntansi syariah yang merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi ada pada tuhan, disusul manusia dan juga alam. Sebagai satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan manusia dan alam, Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang sudah selayaknya bertanggungjawab secara massif kepada dua aspek tersebut sebagai bagian dari menjalankan amanah Allah SWT sebagai pemerintah yang berorientasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Proses pengorganisasian anggaran ini juga disampaikan secara singkat oleh sekretaris Dinas Perikanan Kab. Pinrang.

“Iya setiap dinas ada PAGU anggaran, ditentukan berapa anggaran yang di berikan kepada setiap dinas. Dari anggaran tersebut di bagi ke beberapa bidang yang ada dalam dinas, di bidang tersebut di presentasikan berapa anggaran yang akan diberikan kepada bidang tersebut.” (Hasnah, S. Pi., Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa anggaran setiap dinas yang keluar dibagikan masing-masing kepada setiap bidang dan jumlah anggaran yang diberikan disesuaikan dengan program kerja yang akan dijalankan serta disesuaikan dengan kemampuan mengelolah anggaran di periode sebelumnya. Apa yang disampaikan tersebut memberikan gambaran bagaimana dinas perikanan kabupaten Pinrang melakukan *organizing* yang baik dengan terus berkoordinasi dengan berbagai bidang yang ada dalam lingkup kerja mereka.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak faktor yang diantaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan ekonomi dan kemampuan untuk melaksanakannya. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan ini tidak hanya melibatkan prosedural yang berlaku, tetapi juga melibatkan penjaminan kepercayaan berbagai pihak sebagaimana yang disampaikan oleh kasubag keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang

“Untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan masyarakat maka kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dan selalu melibatkan masyarakat di setiap kegiatan yang akan dilakukan dan memberikan wadah kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh dinas.”

(Syamsuddin Tappe, SE., Kasubag Keuangan Dinas Perikanan Kab. Pinrang)

Apa yang dijelaskan kasubag keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang tersebut menjelaskan bahwa pada pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan baik dan anggaran dilaksanakan secara tetap. Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang harus mengawasi dengan baik proses pelaksanaan anggaran agar dapat menganalisis masalah yang ada dalam pelaksanaan anggaran. Hal tersebut

dilakukan agar pelaksanaan anggaran tidak terdapat masalah yang serius sehingga kepercayaan *stakeholder* tetap terjaga.

d. Pengendalian

Pengendalian dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian sangat penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik. Pengendalian yang dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang yaitu selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program agar masyarakat dapat membantu untuk mengawasi jalannya program kerja secara langsung sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang.

“Pengendalian yang kami lakukan untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan masyarakat maka dari itu kami selalu melibatkan masyarakat disetiap kegiatan yang akan dilakukan dan memberikan wadah kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam segala realisasi anggaran yang ada.”

(Hasnah, S.Pi., Sekretaris Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan selalu melibatkan masyarakat dalam pengendalian yang akan dilakukan dapat menjadi alternatif yang baik dalam mengatasi masalah yang ada dalam penganggaran. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap realisasi anggaran diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang dapat melakukan penganggaran secara adil dan

jujur untuk membantu dalam pengendalian yang dilakukan untuk dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam melakukan penganggaran sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Tabel 4.1 Pengelolaan Anggaran di Dinas Perikanan Kab. Pinrang

No	Pengelolaan Anggaran	Deskripsi
1	Perencanaan	Senantiasa melibatkan masyarakat dalam setiap pembahasan perencanaan program kerja.
2	Pengorganisasian	Apa yang akan dianggarkan dan di programkan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang selalu melibatkan masyarakat dalam struktural pengelolaan anggaran.
3	Pelaksanaan	Pelaksanaan/eksekusi anggaran dilakukan dengan menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan masyarakat secara aktif.
4	Pengendalian	Masyarakat secara aktif dilibatkan dalam pengelolaan anggaran sebagai pengawas utama jalannya anggaran.

2. Model Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang

Penganggaran merupakan kegiatan memperhatikan prioritas program yang nantinya akan disangkutpautkan dengan besaran dana yang akan dialokasikan. Pada pelaksanaannya, dibutuhkan penerapan aspek akuntabilitas dan transparansi guna mencapai ketepatan tujuan dan sasaran anggaran. Kedua aspek ini adalah

bentuk pertanggungjawaban anggaran yang menyangkut masalah akuntabilitas pemerintah secara efisien dan efektif yang dimaksudkan untuk mendorong pemerintahan yang sistematis dan rasional terhadap pengelolaan anggaran. Terkait dengan hal tersebut PLT kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang dalam pernyataannya menyiratkan bahwa akuntabilitas di satuan kerjanya telah dijalankan dengan baik. beliau menuturkan;

“Alhamdulillah akuntabilitas sangat efektif, karena saya paham tanpa adanya akuntabilitas anggaran tidak akan tepat sasaran.”

(Ir. Agustina Torano, PLT Kepala Dinas Kab. Pinrang)

Pernyataan PLT kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang tersebut menggambarkan bahwa reformasi birokrasi telah dijalankan dengan baik sehingga pengelolaan keuangan di satuan kerjanya telah memenuhi prinsip good governance. Terkait dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Dinas Kabupaten Pinrang sendiri, kita bisa mengkategorikannya ke dalam empat tahapan sebagai berikut:

a. Input

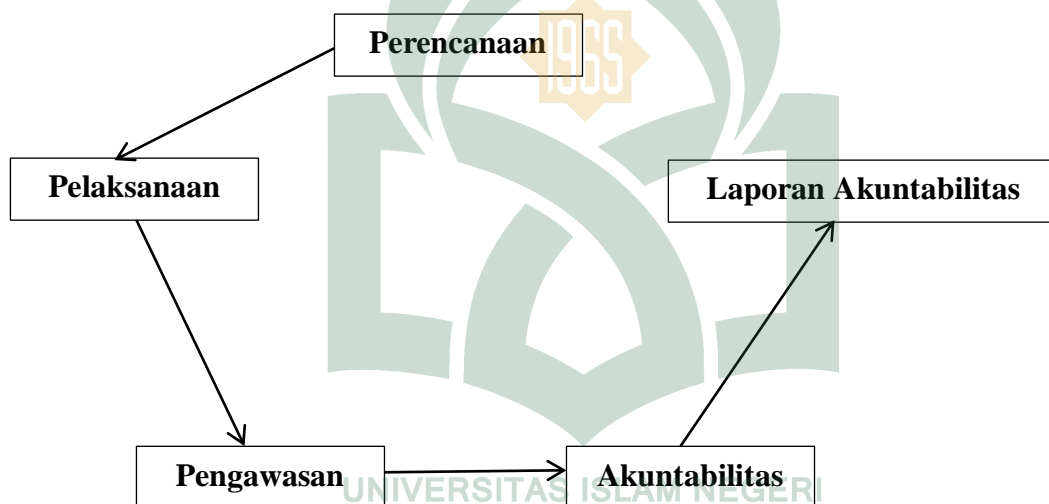
Input adalah semua potensi atau bahan yang dimasukkan ke dalam sebuah proses. Input ini dapat berupa dokumen atau hal lainnya sebagaimana disampaikan oleh sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang;

“Ya, pertanggungjawabannya disini bermacam-macam tergantung dari kegiatannya apa, misalnya nota setiap dana yang dikeluarkan, foto-foto saat kegiatan sedang berlangsung.” **(Hasnah, S. Pi., Sekretaris kepala Dinas Perikanan Kab. Pinrang)**

Pada dasarnya model pertanggungjawaban keuangan atau akuntabilitas memang mempunyai beragam bentuk yang harus disesuaikan dengan bidang

kegiatan atau apa yang di programkan oleh satuan kerja tersebut. Bentuk-bentuk akuntabilitas tersebut meliputi keuangan program serta output yang dihasilkan dari satuan kerja itu sendiri. Didalam lingkup birokrasi kita mengenal sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang menjadi acuan pertanggungjawaban seluruh instansi pemerintahan. Model Pertanggungjawaban yang dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 4.3 Model Akuntabilitas



Pertama, Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang membuat perencanaan program kerja yang akan dilakukan selama 1 periode yang di susun dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan program kerja yang kemudian akan disahkan oleh birokrasi tertinggi di Kabupaten Pinrang. Kedua, Pelaksanaan setiap program kerja oleh bidang-bidang tertentu sesuai dengan program yang telah di rencanakan sebelumnya serta bagaimana setiap bidang dapat memaksimalkan penggunaan anggaran pada masing-masing program kerja agar

sasaran anggaran dapat terealisasi. Ketiga, Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan terhadap kinerja dengan melihat dan memperhatikan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan dari perencanaan program yang telah disepakati sebelumnya. Keempat, masing-masing bidang membuat pertanggungjawaban atas masing-masing program yang telah dilaksanakan. Kelima, laporan pertanggungjawaban masing-masing bidang akan diberikan kepada para investor dan masyarakat untuk dapat menilai bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang.

b. Proses

Proses adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengubah input menjadi hasil/keluaran. Proses ini meliputi pengumpulan bukti-bukti kegiatan yang kemudian dijelaskan oleh Plt. Kepala Dinas Perikanan Kab. Pinrang;

“Pertanggungjawaban yang dilakukan juga diberikan juga kepada masyarakat. proses anggarannya menunggu dari usulan musrembang dari masyarakat, terus di proses di kecamatan selanjutnya di proses di kabupaten, hasil dari kabupaten di rangkum di BKUD kemudian di bagikan kepada setiap dinas.” (Ir. Agustina Torano, PLT Kepala Dinas Perikanan Kab. Pinrang)

Apa yang disampaikan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan didalam *shariah enterprise theory* yang dicetuskan oleh Prof. Iwan Triyono untuk mengembangkan akuntansi syariah yang merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi ada pada tuhan, disusul manusia dan juga alam. Sebagai satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan manusia dan alam, Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang sudah selayaknya bertanggungjawab secara massif kepada dua aspek tersebut sebagai bagian dari menjalankan amanah Allah SWT sebagai pemerintah yang berorientasi pelayanan

dan kesejahteraan masyarakat. Dari pernyataan tersebut kita juga dapat mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proses ini, yaitu dinas perikanan itu sendiri bersama dengan pemerintah daerah dan pusat serta khususnya dengan masyarakat melalui musrembang.

c. Output dan Outcome

Output adalah hasil langsung yang dirasakan dari proses, sedangkan Outcome adalah efek jangka panjang dari proses tersebut berupa manfaat atau harapan perubahan. Output dalam akuntabilitas dinas perikanan kabupaten Pinrang adalah berupa laporan pertanggungjawaban anggaran yang dibuat sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada realitanya sistem ini kadang berjalan tidak sebagaimana mestinya dikarenakan beberapa permasalahan seperti yang disampaikan oleh kasubag keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang ;

“Kadang pertanggungjawaban yang dibuat oleh bidang tidak lengkap, jadi pertanggungjawaban harus di pending sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.” (Syamsuddin Tappe, SE., Kasubag Keuangan Kab. Pinrang)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sistem akuntabilitas yang baik tidak serta merta berjalan secara sempurna karna ada beberapa hambatan seperti yang telah disebutkan tersebut. Guna mengkonfirmasi hal tersebut peneliti kemudian menanyakan kepada masyarakat tentang akuntabilitas Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang kepada Saiful selaku warga yang menjalankan usaha di bidang perikanan ;

“Betul itu dek, itu pak kepala dinas kemarin memang selalu terbuka sama masyarakat. Pernah itu dia bilang sama saya ada anggaran sekian dan nanti itu mau dialokasikan untuk warga pesisir kayak

nelayan yang ada disini. Beliau juga itu dulu kalau selesai rapat anggaran pasti turun ke masyarakat sosialisasi sekaligus dia sampaikan ke kami berapa anggaran untuk bidang ini dan sebagainya. Saya berharap penggantinya nanti karna yang menjabat sekarang sementara belum pernah turun ke masyarakat. saya tidak tau kenapa, apa karna dia perempuan atau karna barupi” (Saiful, Masyarakat)

Jawaban dari Saiful memberikan gambaran bahwa pada dasarnya Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah menjalankan akuntabilitas dengan sangat baik hingga ke level masyarakat yang dinilai sangat partisipatif dan transparan sesuai dengan konsep tata kelola instansi yang baik. Hal ini perlu dipertahankan agar kiranya kinerja yang baik secara berkelanjutan sebagai bagian dari *outcome* yang diharapkan dapat terus terjaga. Hal lain yang menjadi *outcome* juga dalam akuntabilitas anggaran dalam hal ini adalah menjaga aliran dana agar kiranya tepat sasaran sebagaimana yang telah dianggarkan.

Tabel 4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dinas Perikanan Kab. Pinrang

No	Model Akuntabilitas	Deskripsi
1	Input	Proses input dalam hal ini berupa pengumpulan bukti-bukti transaksi yang akan diproses dalam rangka pembuatan laporan akuntabilitas.
2	Proses	Proses dalam hal ini mengelolah bukti-bukti transaksi secara terpadu guna dimasukkan dalam pos-pos laporan akuntabilitas.
3	Output dan Outcame	Output dalam hal ini laporan akuntabilitas anggaran yang disetorkan kepada para stakeholder. Sedangkan outcame adalah dampak dari adanya laporan akuntabilitas yang

		dibuat.
--	--	---------

3. Aktualisasi *Maqashid Shariah* dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang

Akuntabilitas dalam perspektif islam merupakan kajian tentang norma-norma positif yang membahas mengenai nilai-nilai ketuhanan dalam keseharian manusia dalam rangka mencari keberkahan Allah SWT. Tujuan utama dari akuntabilitas dalam islam tidak hanya berfokus pada aspek duniawi tetapi berusaha untuk mencapai nilai instrinsik jangka panjang dalam aspek *ukhrowi*. Karakteristik akuntabilitas dalam islam mencakup pembangunan masyarakat, kepedulian dan keadilan sosial dalam organisasi, serta kesetaraan suara antar semua elemen. Terkait dengan hal tersebut sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang kemudian mengutarakan jawabannya;

“Banyak kritik yang biasa diberikan oleh masyarakat karna kurangnya kepuasan dari kinerja dinas. Untuk menanggulangi kritik tersebut masyarakat diberikan ruang untuk melakukan musyawarah, apa yang diinginkan misalnya pembuatan saluran tambak di daerah masing-masing.” (Hasnah, S. Pi., Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Pinrang)

Jawaban tersebut memperjelas bahwasanya akuntabilitas islam telah diterapkan di Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat, keadilan sosial, serta kesetaraan suara. Jika dikorelasikan dengan konsep *maqashid syariah* apa yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah relevan dengan 5 tujuan utama yang terkandung dalam *maqashid syariah* itu sendiri.

1. *Hifdz ad-din* (Memelihara Agama)

Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan bahwa ketika hal ini tidak dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Terkait hal ini peneliti menganalisis bahwasanya Dinas perikanan kabupaten pinrang telah menerapkan *Hifdz ad-din* dengan menyediakan fasilitas ibadah khusus bagi karyawan yang beragama islam unntuk melaksanakan kewajibannya serta memberikan waktu istirahat kepada karyawan yang beragama islam setiap memasuki waktu shalat agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu. Pada bulan ramadhan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang mengadakan buka puasa bersama serta membagikan makanan buka puasa untuk menjaga silaturahmi sesama karyawan. Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang juga mencoba menerapkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan prinsip islam agar tetap dapat menjaga konsistensi dalam bekerja, serta mereka telah memelihara amanah dengan cara menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk kewajiban menjaga akuntabilitas. Amanah yang telah dijaga ini mencerminkan kecerdasan (fathanah) yang dilandasi dengan sifat jujur (shiddiq) dimana mereka menyampaikan setiap kendala secara transparan. Perwujudan shiddiq dalam hal ini dijelaskan oleh Saiful;

“Itu dinas perikanan transparan sekali dek, pokoknya itu berapa anggaran yang keluar begitu juga yang disampaikan ke masyarakat, misalnya dia bilang anggaran pembibitan seratus juta dan sampai di masyarakat juga seratus juta pokoknya itu tidak pernah ada ditutup tutupi dari masyarakat.” (saiful, Masyarakat)

Secara spesifik implementasi *hifdz ad-din* (Memelihara Agama) terhadap sifat amanah, shiddiq, fathanah dan tablig dapat diuraikan sebagai berikut:

- Implementasi *hifdz ad-din* (Memelihara Agama) terhadap sifat amanah yaitu bagaimana karyawan di dinas perikanan menjaga pertanggungjawaban terlaksananya anggaran yang terbuka.
- Implementasi *hifdz ad-din* (Memelihara Agama) terhadap sifat shiddiq yaitu bagaimana mengarahkan instansi untuk jujur dan terbuka terhadap jumlah penerimaan, realisasi, dan selisih anggaran secara detail dan transparan.
- Implementasi *hifdz ad-din* (Memelihara Agama) terhadap sifat tablig yaitu instansi menyampaikan jumlah pengeluaran dan pemasukan anggaran kepada masyarakat.
- Implementasi *hifdz ad-din* (Memelihara Agama) terhadap sifat fathanah yaitu instansi membuat sistem akuntabilitas anggaran yang efektif dan efisien, demi menjaga instansi dari mode “mubassir”.

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama. Kedua, memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan

mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Terakhir, Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini erat kaitannya dengan Akhlak yang terpuji.

2. *Hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam Penelitian ini peneliti menemukan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah menjaga *hifdz an-nafs* dengan memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan kinerjanya, memberikan tunjangan, asuransi jiwa, bonus untuk mengapresiasi kinerja karyawan, serta memberikan cuti kepada karyawan. Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah memelihara jiwa mereka dari sifat serakah dengan tetap peduli dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunan program di Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang. Menjaga jiwa dalam islam merupakan bentuk implementasi sifat fathanah, sebab hal itu menjadi proses penjagaan amanah terkait dengan transparansi anggaran melalui partisipasi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Saiful;

“oh jelas masa kita dikasi dana baru kita tidak diawasi. jadi begini, itu pemerintah nakasi kita anggara demikian untuk jalankan program. nanti itu kita ini masyarakat yang dikasi anggaran kita kelola dan pengelolaannya itu diawasi pengawas dari dinas perikanan. semua biaya yang dikeluarkan selama program kita catat untuk nanti dilaporkan kedinas melalui pengawas ini. kita juga tidak berani macam-macam karna kita tau ini uang negara, tapi intinya itu sudah bagus pengelolaan anggarannya dinas perikanan.”
(Saiful, Masyarakat)

Pernyataan tersebut mengindikasikan jika *maqashid syariah* sebagai perwujudan kebaikan sekaligus penghindaran dari keburukan telah diterapkan di Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang guna menarik manfaat dan menolak mudharat dari program yang dibuat dan dijalankan. Dengan demikian *maqashid syariah* dalam hal ini menyarankan pemblokiran sarana-sarana dan aspek-aspek yang bisa mengakibatkan penyalahgunaan wewenang pencapaian tujuan yang illegal dan mengusahakan tercapainya tujuan secara maksimal berlandaskan nilai-nilai islam.

Secara spesifik implementasi *hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa) terhadap sifat amanah, shiddiq, fathanah dan tablig dapat diuraikan sebagai berikut:

- Implementasi *hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa) terhadap sifat amanah yaitu bagaimana instansi menjaga asas partisipasi anggaran dengan melibatkan masyarakat untuk memusyawarakan program.
- Implementasi *hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa) terhadap sifat shiddiq yaitu instansi jujur dan terbuka terkait apa yang di programkan kepada masyarakat.
- Implementasi *hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa) terhadap sifat tablig yaitu bagaimana cara instansi menyampaikan secara spesifik terkait anggaran dan program yang terealisasi.
- Implementasi *hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa) terhadap sifat fathanah yaitu bagaimana instansi menerapkan kepada karyawan untuk tetap menjaga jiwa agar tidak serakah terhadap anggaran yang telah ada.

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Kedua, memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Ketiga, memelihara dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan.

3. *Hifdz al-aql* (Memelihara Akal)

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah menjaga *hifdz al-aql* yang artinya mereka menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi dan mengesampingkan nafsunya terhadap peluang mendapatkan harta, jabatan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang selalu mengikutsertakan beberapa karyawan untuk mengikuti pelatihan dan seminar baik dalam kota maupun diluar kota untuk menambah pengetahuan karyawan. Mengadakan penyuluhan mengenai narkoba, minuman keras, judi serta hal-hal lainnya yang dapat merusak diri manusia. Hal ini erat kaitannya dengan etika yang secara tidak langsung mengancam eksistensi mereka dihadapan tuhan selaku stakeholder tertinggi. Pada dasarnya menjaga akal

sama pula dengan menjaga kecerdasan yang merupakan amanah dari Allah. Mereka juga telah menjaga akal yang merupakan salah satu bentuk penyampaian terhadap apa yang dititipkan oleh Allah SWT. Terkait dengan hal ini, Kasubag Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa;

“Disini kami selalu menjaga pikiran kami dari sesuatu dan niat yang tidak baik agar tidak terjadinya penyimpangan dalam anggaran yang kami keluarkan.” (Syamsuddin tappe, SE., Kasubag keuangan Dinas Perikanan Kab. Pinrang)

Secara spesifik implementasi *hifdz al-aql* (Memelihara akal) terhadap sifat amanah, shiddiq, fathanah dan tablig dapat diuraikan sebagai berikut:

- Implementasi *hifdz al-aql* (Memelihara akal) terhadap sifat amanah yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang berfokus pada pencapaian program yang telah dianggarkan sebelumnya.
- Implementasi *hifdz al-aql* (Memelihara akal) terhadap sifat shiddiq yaitu jujur dalam menjalankan amanah selagi tidak bertentangan dengan etika dan peraturan.
- Implementasi *hifdz al-aql* (Memelihara akal) terhadap sifat fathanah yaitu instansi dapat menggunakan kecerdasan yang notabenenya berasal dari akal untuk menciptakan akuntabilitas anggaran yang lebih baik.
- Implementasi *hifdz al-aql* (Memelihara akal) terhadap sifat tablig yaitu instansi dapat menjaga eksistensi dengan berterus terang keadaan yang ada dalam penganggaran yang dilakukan.

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti

diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Kedua, Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. *Hifdz al-mal* (Memelihara Harta)

Memelihara harta dalam temuan penelitian ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Memelihara harta dimana hal ini di gambarkan bahwasanya mereka sangat menghindari adanya harta yang mereka dapatkan dari jalur-jalur yang tidak diridhohi oleh Allah SWT. Harta yang dimaksud dalam ini adalah anggaran yang di kelola merupakan amanah dan harus tersampaikan ke masyarakat secara spesifik sebagai bentuk perwujudan kecerdasan. Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang juga mengetahui mengenai hak dan kewajibannya kepada stakeholder dengan menyampaikan bagaimana anggaran tersebut diperoleh serta bagaimana proses penggunaan anggaran secara transparan meskipun terkadang dalam hal melakukan pertanggungjawaban pihak-pihak tertentu biasanya tidak membuat atau terlambat dalam melakukan pertanggungjawaban sehingga terjadi pemotongan anggaran. Instansi kadang dinilai tidak efektif pada saat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga beberapa masyarakat kadang berpikir bahwa ada beberapa

informasi penting yang tidak disampaikan Dinas Perikanan kepada masyarakat. Urgensi terkait pentingnya menjaga harta ini disampaikan oleh Kasubag Keuangan Dinas Perikanan Kab. Pinrang;

“Bagi kami anggaran adalah hutang yang harus dijaga karenan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dialokasikan secara maksimal untuk masyarakat.” (Syamsuddin tappe, SE., Kasubag keuangan Dinas Perikanan Kab. Pinrang)

Secara spesifik implementasi *hifdz al-mal* (Memelihara Harta) terhadap sifat amanah, shiddiq, fathanah dan tablig dapat diuraikan sebagai berikut:

- Implementasi *hifdz al-mal* (Memelihara Harta) terhadap sifat amanah yaitu bagaimana instansi menjaga anggaran dari berbagai penyimpangan yang bisa mencederai keberkahannya.
- Implementasi *hifdz al-mal* (Memelihara Harta) terhadap sifat shiddiq yaitu instansi membiasakan pola hidup jujur dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran walaupun kadang lupa atau terlambat terkait hal tersebut yang mengakibatkan adanya pemotongan anggaran.
- Implementasi *hifdz al-mal* (Memelihara Harta) terhadap sifat fathanah yaitu dapat membentuk sistem pengelolaan anggaran yang akuntabel demi tercapainya sasaran anggaran yang ingin dicapai.
- Implementasi *hifdz al-mal* (Memelihara Harta) terhadap sifat tablig yaitu instansi menyampaikan secara temporal dan peridik terkait capaian kinerja yang berjalan terhadap anggaran.

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, memelihara harta dalam peringkat dhururiyyat, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta

orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga, memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan.

5. *Hifdz an-nasb* (Memelihara Keturunan)

Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah mengimplementasikan *hifdz an-nasb* dengan cara menjaga dari sifat mungkar dengan terus melakukan kegiatan terkait dengan program sesuai dengan petunjuk agama dan tetap berpedoman kepada nilai-nilai moral. Mereka sadar bilamana mereka tidak menjalankan pedoman agama, maka eksistensi keturunannya akan terancam yang berarti keturunannya bisa saja tidak lagi dihargai dan diterima oleh masyarakat karena dianggap tidak mampu bersifat jujur dan amanah serta tidak mampu mengelola kecerdasannya. Hal ini menjadi sangat penting karna terkait dengan bagaimana mensinkronisasi semua sifat wajib nabi dalam segala tindak yang dilakukan.

Secara spesifik implementasi *hifdz an-nasb* (Memelihara Keturunan) terhadap sifat amanah, shiddiq, fathanah dan tablig dapat diuraikan sebagai berikut:

- Implementasi *hifdz an-nasb* (Memelihara Keturunan) terhadap sifat amanah yaitu instansi mengedepankan sifat amanah sebagai contoh konkrit dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel.

- Implementasi *hifdz an-nasb* (Memelihara Keturunan) terhadap sifat shiddiq yaitu instansi tetap transparan terhadap segala hal seperti jumlah anggaran dan program-program terutama program unggulan.
- Implementasi *hifdz an-nasb* (Memelihara Keturunan) terhadap sifat tablig yaitu instansi menyampaikan kondisi instansi apa adanya terkait pengelolaan anggaran.
- Implementasi *hifdz an-nasb* (Memelihara Keturunan) terhadap sifat fathanah yaitu instansi berusaha terus berbenah agar dapat menciptakan keberlanjutan pengelolaan yang efektif dan berkualitas.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, memelihara keturunan dalam peringkat dhururiyyat, seperti disyari'atkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. Ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Birokrasi atau pemerintahan merupakan amanah dan tantangan yang diberikan oleh Allah SWT untuk menguji keimanan hambanya entah itu secara individu maupun kolektif. Hal ini mengacu pada konsep *maqashid syariah* yang terintegrasi dengan sifat wajib nabi (An-nubuwwah) yakni shiddiq, amanah, fathanah dan tablig. Perwujudan shiddiq dalam hal ini dijelaskan oleh Saiful ;

Selain konsep shiddiq dan amanah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti juga menganggap bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah memenuhi konsep fathanah dan tablig. Fathanah dalam hal ini dapat dilihat dari pengetahuan informan terkait dengan akuntabilitas anggaran serta bagaimana mereka menjaga etika profesionalismenya dengan terus berkomunikasi dan berinteraksi secara massif dengan masyarakat.

Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang sendiri dalam konfirmasinya bertekad untuk menjaga kepercayaan seluruh stakeholder demi terwujudnya sinergitas dan elaborasi positif guna mensukseskan apa yang telah mereka programkan sebelumnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kasubag keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang ;

“untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan masyarakat maka kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dan selalu melibatkan masyarakat di setiap kegiatan yang akan dilakukan dan memberikan wadah kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh dinas.” (Syamsuddin Tappe, SE., Kasubag Keuangan Dinas Perikanan Kab. Pinrang)

Apa yang dijelaskan kasubag keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang tersebut relevan dengan apa yang dijelaskan Allah SWT dalam surah At-Tahrim Ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT. terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya penting untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang digambarkan sebagai keluarga dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pinrang yang harus senantiasa saling menjaga dan mengingatkan agar tetap berada pada koridor nilai-nilai islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam lima konsep utama *maqashid syariah* yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Penerapan konsep *maqashid syariah* pada pengelolaan anggaran ini sangat di dukung oleh PLT dinas perikanan kabupaten pinrang yang notabene bukan merupakan orang islam (non muslim) menyatakan ;

“Penerapan prinsip islam sangat bagus dalam menjalankan tugas karena sekarang dibutuhkan kejujuran dalam bekerja, efesiensi anggaran. jika melakukan pekerjaan dengan dibarengi kejujuran otomatis anggaran tidak kemana-mana dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan sehingga tidak ada penyimpangan yang terjadi.”

(Ir. Agustina Torano, PLT Dinas Perikanan Kab. Pinrang)

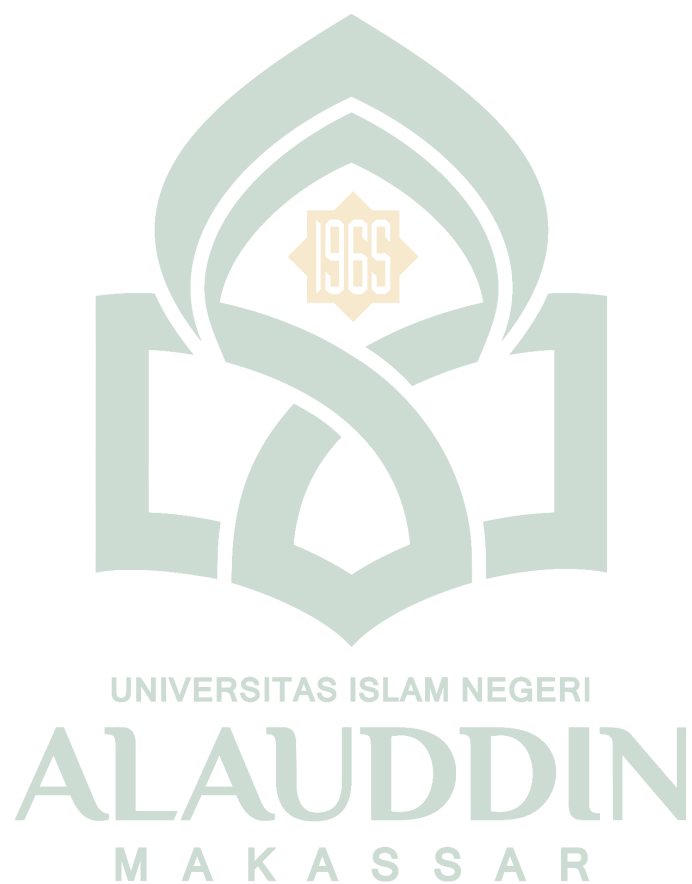
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa islam bersifat universal dan di dukung serta dikagumi bahkan oleh non muslim sendiri. Olehnya itu menjadi wajib bagi kita umat islam agar kiranya dapat menjalankan prinsip islam secara

kaffah dan konsisten bukan hanya pada lingkup pengelolaan anggaran tetapi juga pada seluruh aspek perilaku keseharian kita.

Tabel 4.3 Analisis *Maqashid Shariah*

No	Indikator	Aktualisasi
1	<i>Hifdz ad-din</i> (Menjaga Agama)	Dinas perikanan kabupaten pinrang telah menerapkan <i>Hifdz ad-din</i> yang artinya mereka telah memelihara amanah dengan cara menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk kewajiban menjaga akuntabilitas. Amanah yang telah dijaga ini mencerminkan kecerdasan (<i>fathanah</i>) yang dilandasi dengan sifat jujur (<i>shiddiq</i>) dimana mereka menyampaikan setiap anggaran secara transparan.
2	<i>Hifdz an-nafs</i> (Memelihara Jiwa)	Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah menjaga <i>hifdz an-nafs</i> yang artinya mereka telah memelihara jiwa mereka dari sifat serakah dengan tetap peduli dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunan anggaran di Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang.
3	<i>Hifdz al-aql</i> (Memelihara Akal)	Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah menjaga <i>hifdz al-aql</i> yang artinya mereka menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi dan mengesampirkan nafsunya terhadap peluang mendapatkan harta, jabatan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan etika yang secara tidak langsung mengancam eksistensi mereka dihadapan tuhan selaku stakeholder tertinggi.
4	<i>Hifdz al-mal</i> (Memelihara Harta)	Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah menyampaikan pengelolaan anggaran kepada masyarakat namun terkadang dalam hal melakukan pertanggungjawaban pihak-pihak tertentu biasanya tidak membuat atau terlambat dalam melakukan pertanggungjawaban sehingga terjadi pemotongan anggaran. Instansi kadang dinilai tidak efektif pada saat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga beberapa masyarakat kadang berpikir bahwa ada beberapa informasi penting yang tidak disampaikan Dinas Perikanan kepada masyarakat
5	<i>Hifdz an-nasb</i> (Memelihara Keturunan)	Dinas perikanan kabupaten pinrang telah mengimplementasikan <i>hifdz an-nasb</i> dengan cara menjaga dari sifat mungkar dengan terus melakukan kegiatan terkait dengan program sesuai dengan

		<p>petunjuk agama dan tetap berpedoman kepada nilai-nilai moral. Mereka sadar bilamana mereka tidak menjalankan pedoman agama, maka eksistensi keturunannya akan terancam yang berarti keturunannya bisa saja tidak lagi dihargai dan diterima oleh masyarakat karena dianggap tidak mampu bersifat jujur dan amanah serta tidak mampu mengelola kecerdasannya terkait anggaran yang ada.</p>
--	--	---



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang dalam perspektif *maqashid shariah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran dinas perikanan telah terkelola dengan baik melalui prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan program-program yang dianggarkan oleh dinas perikanan kabupaten Pinrang. Setiap melakukan penyusunan program kerja Dinas Perikanan selalu mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan program apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Perikanan.
2. Model akuntabilitas fokus pada outcome yang dimulai dari input berupa bukti-bukti transaksi maupun dokumentasi kegiatan, proses berupa pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran, output berupa laporan pertanggungjawaban, serta outcome berupa kualitas kinerja yang dapat dinilai oleh pemerintah dan masyarakat. Namun terkadang pertanggungjawaban yang dilakukan tidak lengkap atau biasa terlambat dalam melakukan pelaporan akuntabilitas yang menimbulkan adanya kecurigaan bahwa ada beberapa informasi penting yang tidak disampaikan dalam pelaporan yang dibuatnya.

3. Secara umum akuntabilitas anggaran yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan lima prinsip dalam konsep *maqashid syariah* yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nas*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz an-nasb* meskipun terdapat beberapa kendala yang masih harus dibenahi guna menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik lagi kedepannya.

B. Keterbatasan Penelitian

Suatu penelitian tentu tidak luput dari berbagai kekurangan dan hambatan. Maka dari itu muncul keterbatasan-keterbatasan diluar kuasa peneliti. Berdasarkan hal tersebut, keterbatasan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan pengetahuan informan terkait dengan pengelolaan anggaran secara prosedural sehingga mengungkap suatu temuan adanya keterlambatan bahkan kealpaan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran.
2. Ketidakmampuan informan untuk memaparkan jumlah anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang dikarenakan sering terjadinya pemotongan anggaran yang disebabkan oleh kelalaian dalam proses pertanggungjawaban anggaran.
3. Bias subjektivisme penelitian yang tidak bisa dihindari meskipun telah digunakan metode triangulasi sumber data dalam uji keabsahan data penelitian.

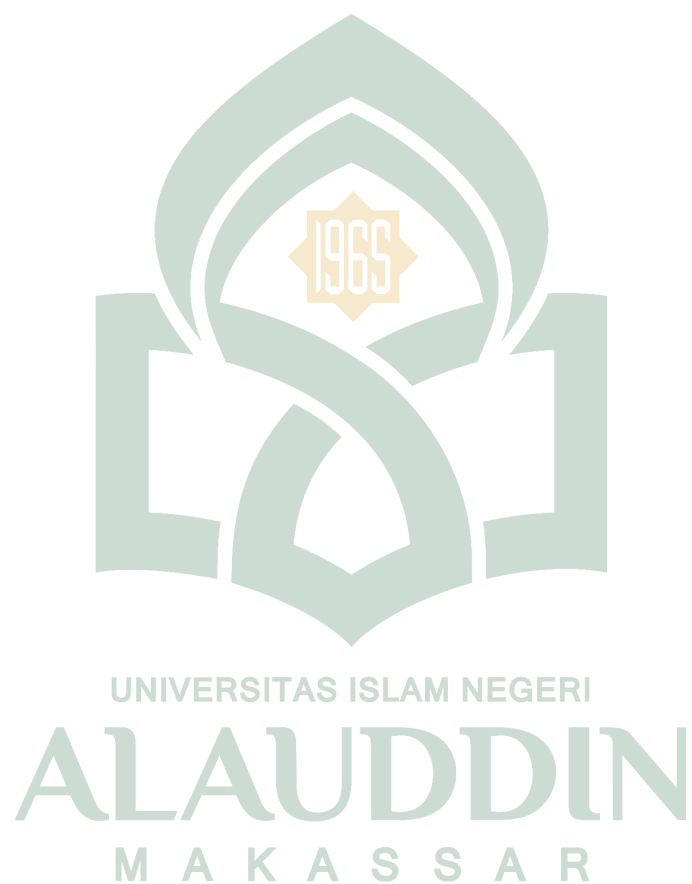
4. Informan kunci yaitu plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang merupakan non-muslim sehingga informasi yang diberikan tidak terlalu rinci, khususnya mengenai konsep *maqashid shariah*.
5. Penelitian dilakukan pada saat situasi dan kondisi sedang dalam pandemic covid-19. Kondisi yang membuat pemerintah menerapkan social distancing yang membatasi ruang gerak peneliti dalam upaya penyelesaian tugas akhir.
6. Jumlah informan yang hanya 4 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

C. Implikasi Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan implikasi atau dampak yang positif bagi berbagai aspek yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Adapun implikasi penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pendorong bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang untuk membenahi sistem akuntabilitas anggarannya.
2. Penelitian diharapkan menjadi motivasi bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang untuk menerapkan konsep *maqashid shariah* secara efektif.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh lebih banyak informasi dari berbagai narasumber.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih responden yang tepat untuk topik penelitian yang akan diteliti.

5. Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang tidak dapat disebutkan secara rinci oleh peneliti dan diharapkan dapat memperoleh perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

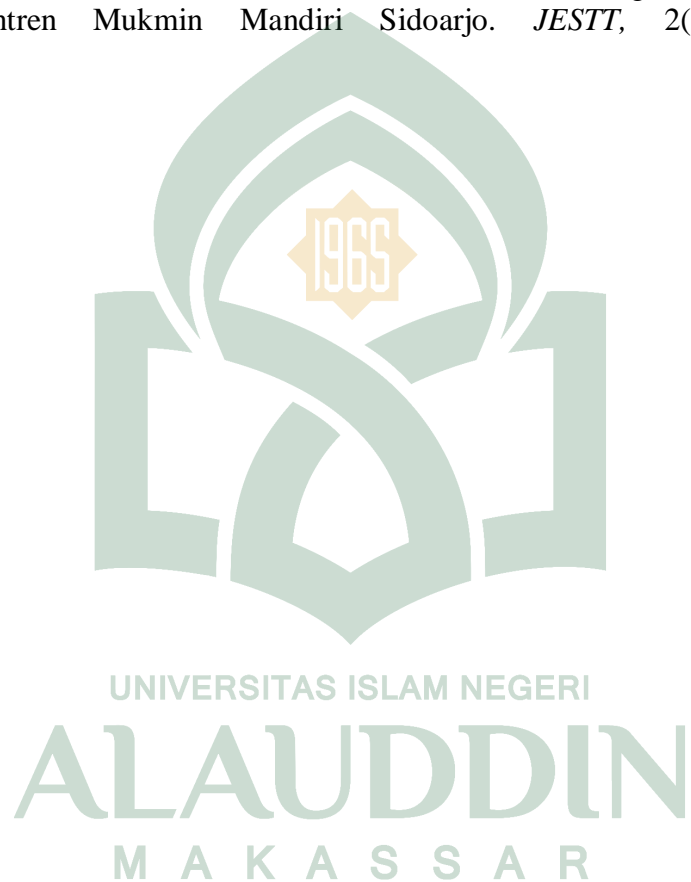
- Adiwirya, M. F. dan I. P. Sudana. 2015. Akuntabilitas Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(2): 611-628.
- Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2): 137-141.
- Afriyanti, D., H. G. Sabanu, dan F. Noor. 2015. Accountability Index Assessment of Government Agencies. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1): 21-42.
- Ahmed, A. A. A.. 2012. Accounting in Islamic Perspective: A Timely Opportunity A Timely Challenge. *ASA University Review*, 6(2): 11-31.
- Ahyaruddin, M. dan R. Akbar. 2018. Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 19(1): 1-11.
- Aliya dan Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeparah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2): 97-189.
- Almubarak, F. 2018. Keadilan dalam Perspektif Islam. *ISTIGHNA*, 1(2): 115-143.
- Amalia, F. 2013. Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil. *Al-Iqtishad*, 6(1): 133-142.
- Anggriani, N., I. Nurodin, dan D. Iskandar. 2019. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Ekono insentif*, 13(2):134-145.
- Atmadja, A. T. 2013. Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2): 122-141.
- Ayuni, N. M. K. dan N. M. A. Erawati. 2018. Pengaruh Asimetri Informasi pada Senjangan Anggaran dengan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1): 492-520.
- Azmi, Z., A. Arif dan Wardayani. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1): 159-168.
- Baidhowi, B. dan I. Zaki. 2014. Implementasi Konsumsi Islami pada Pengajar Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada Pengajar Pondok Pesantrenal Aqobah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). *JESTT*, 1(9): 1-12.
- Basri, R. 2013. Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4): 202-212.
- Boy, D. dan H. Siringoringo. 2009. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

- (Apbs) terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(12): 1-9.
- Bukhari, A. Tafsir, dan H. Tanjung. 2017. Pendidikan Kejujuran dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara. *Jurnal EduTech*, 3(1): 1-17.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Daniel, C. O. 2019. Corporate Governance and Its Effects on Accountability and Financial Performance of Organisations. *Management and Economic Journal*, 3(1): 476-489.
- Epstein, M. J., & McFarlan, F. W. 2011. Measuring the efficiency and effectiveness of a nonprofit's performance. *Strategic Finance*, 93(4): 27-34.
- Fauzi, M. 2012. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Menggunakan Income Statement Approach dan Value Added Approach. *Fokus Ekonomi*, 7(2): 58-79.
- Fitriani, D. 2014. Balanced Scorecard: Alternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 6(1): 16-31.
- Ghulam, Z. 2016. Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1): 90-112.
- Haetami, E. 2015. Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn Bin 'Abd Al-Salâm dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 17(1): 29-44.
- Hamidi, M. F. 2014. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban. *DIA, Jurnal Administrasi Publik*, 12(1): 39-62.
- Hanifah, S. I. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(8): 1-11.
- Hartono, N. 2018. Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Intellectual Capital (IC) terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Amwal*, 10(2): 259-282.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Jaya, A. S. F. 2011. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Pnbp) dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan pada Universitas Syiah Kuala. *JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI*, 4(1): 1-20.

- Julita, 2012. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. 1-9.
- Kalbarini, R. Y. 2018. Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1): 1-11.
- Kalbarini, R. Y. dan N. Suprayogi. 2014. Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta). *JESST*, 1(7): 506-517.
- Kewo, C. L. 2017. The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1): 293-297.
- Klychova, Faskhutdinova, dan Sadrieva. 2014. Budget Efficiency for Cost Control Purposes in Management Accounting System. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(24): 79-82.
- Korompot, R. dan A. T. Poputra. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. *Jurnal Emba*, 3(1): 843-848.
- Kruger, M. and Seng, Y. 2015. Leadership with inner meaning: A contingency theory of Leadership based on the views of five religions. *The Leadership Quarterly* 16(1): 771-806
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Lontaan, I. C., dan S. Pangerapan. 2016. Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal Emba*, 4(1): 898-906.
- Mursal dan Suhadi. 2015. Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, 9(1): 62-92
- Mustafa, Z. 2014. Kualifikasi Maqashid Syariah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam. *Al-daulahi*, 3(2): 143-152.
- Nabilah, N., Maslichah, dan M. C. Mawardi. 2019. Perspektif Maqashid Syariah pada Pengungkapan Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah di Indonesia. *E-JRA*, 8(3): 33-42.
- Nafidah, L. N., dan N. Anisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2): 273-288.
- Nurul, F. R. 2016. Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial. *Dimensi*, 9(2): 87-92.
- Pangumbalerang, A dan S. Pinatik. 2014. Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah

- dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. *Kejelasan Sasaran Anggaran*, 2(2): 800-808.
- Prasetio, J., E. 2017. Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1): 19-33.
- Purnama, F., dan Nadirsyah. 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2): 1-15.
- Reheul, A. M., Caneghem, & Verbruggen. 2014. Financial reporting lags in the nonprofit sector: An empirical analysis. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 25(12): 352-377.
- Rizal, S. A. Fitri, dan D. Rantika. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al- Iqtishad*, 14(1): 20-37.
- Rotich, C., K., dan S. Ngahu. 2015. Factors Affecting Budget Utilization Kericho County Government In Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom*, 3(6): 1-18.
- Sa'adah, B. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2): 1-10.
- Sudrajat, A. dan A. Sodik. 2016. Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(1): 178-200.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.
- Sulfiati, A. S. Alam, dan A. L. Irwan. 2010. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2): 113-122.
- Sultan. 2014. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran. *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad*, 6(1): 1-8.
- Thoyib, M., I. Satriawan, F. Husin, M. Asmarani, dan Periansya. 2017. Determination of Performance Accountability of Local Government Organizations in Palembang. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 3(2): 136-146.
- Viali, P. R. dan E. D. Retnani. 2013. Penggunaan Anggaran dalam Penilaian Kinerja Manajemen. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 2(10): 1-21.
- Wahyuni, M. 2013. Penerepan Akuntansi Islam dan Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah. *IIA (1A)*:1-13.

- Wina, I. P. H., dan S. Khairani. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, Dan Dishub Prov): 1-15.
- Wowurantu, R. H., dan T. Runtu. 2014. Analisis Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan Pengaruhnya pada Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Analisis Perubahan Siste*, 2(3): 559-569.
- Yumni, A. 2016. Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah. *Nizhamiyah*, VI(2): 47-57.
- Zahroh, F. dan M. Nafik. 2015. Nilai Fathonah dalam Pengelolaan Bisnis di Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo. *JESTT*, 2(9): 745-758.





LAMPIRAN 1

MANUSKRIP WAWANCARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Informan ke 1

Ir. Agustina Torano (PLT Kepala dinas kelautan dan perikanan)

1. Bagaimana prosedur penganggaran pada dinas perikanan kabupaten pinrang?
= Penganggaran di Dinas Perikanan ini dimulai dari usulan musrembang, dimasukkan di tingkat kecamatan kabupaten, apa yang diusulkan di masyarakat di proses ke kabupaten. Setelah itu tim anggaran memerinci berapa anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu
2. Bagaimana proses penentuan anggaran yang digunakan untuk menjalankan program yang ada pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten pinrang?
= Dimulai dari usulan musrembang, dimasukkan di tingkat kecamatan kabupaten, apa yang diusulkan di masyarakat di proses ke kabupaten. - setelah itu tim anggaran memerinci berapa anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu.
3. Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas anggaran pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten pinrang?
= akuntabilitas sangat efektif, karena tanpa adanya akuntabilitas anggaran tidak akan tepat sasaran.

Saya selaku peneliti dalam hal ini ingin menggunakan konsep maqashid syariah yang dalam hal ini diproksikan dengan konsep agama untuk mengkaji akuntabilitas penggunaan anggaran pada dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pinrang. Proksi ini kemudian diturunkan untuk menjaga kepercayaan stakeholder.

4. Bagaimana dinas kelautan dan perikanan kabupaten pinrang menanggapi kritik dan saran atas kinerja yang mereka lakukan?
= Banyak kritik yang biasa diberikan oleh masyarakat karna kurangnya kepuasan dari kinerja dinas. untuk menanggulangi kritik tersebut masyarakat diberikan ruang untuk melakukan musyawarah, apa yang diinginkan misalnya pembuatan saluran tambak di daerah masing-masing.
5. Apakah anda sudah mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam bertugas?
= Penerapan prinsip islam sangat bagus dalam menjalankan tugas karena sekarang dibutuhkan kejujuran dalam bekerja, efesiensi anggaran. jika melakukan pekerjaan dengan dibarengi kejujuran otomatis anggaran tidak kemana-mana dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan sehingga tidak ada penyimpangan yang terjadi.

Informan ke 2

Syamsuddin Tappe, SE. (Kasubag Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)

1. Bagaimana model pertanggungjawaban yang anda lakukan selaku kasubag keuangan terkait anggaran di dinas kelautan dan perikanan?
= Disesuaikan dengan usulan masyarakat untuk kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh bidang tersebut. dalam setiap bidang harus ada administrasinya.
2. Apa kendala yang biasa anda hadapi selaku kasubag keuangan terkait anggaran di dinas kelautan dan perikanan ini?
= Kadang pertanggungjawaban yang dibuat oleh bidang tidak lengkap, jadi pertanggungjawaban harus di pending sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.
3. Bagaimana dinas kelautan dan perikanan kabupaten pinrang menjaga kepercayaan para stakeholder, termasuk peran sekretaris sebagai yang bertanggungjawab atas pembuatan Laporan Pertanggungjawaban?
= Untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan masyarakat maka kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dan selalu melibatkan masyarakat di setiap kegiatan yang akan dilakukan dan memberikan wadah kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh dinas

Informan ke 3

Hasnah, S. Pi. (Sekretaris Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)

1. Berapa jumlah anggaran yang dialokasikan pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten pinrang?
= Anggaran yang diberikan setiap tahunnya berbeda-beda karna adanya faktor kurangnya anggaran, kurangnya usulan dari masyarakat
2. Bagaimana proses penentuan anggaran yang digunakan untuk menjalankan program yang ada pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten pinrang?
= Setiap dinas ada PAGU anggaran, ditentukan berapa anggaran yang di berikan kepada setiap dinas. dari anggaran tersebut di bagi ke beberapa bidang yang ada dalam dinas, di bidang tersebut di presentasika berapa anggaran yang akan diberikan kepada bidang tersebut.
3. Bagaimana model pertanggungjawaban anggaran pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten pinrang?
= Pertanggungjawabannya bermacam-macam tergantung dari kegiatannya apa, misalnya nota setiap dana yang dikeluarka, foto-foto saat kegiatan sedang berlangsung.

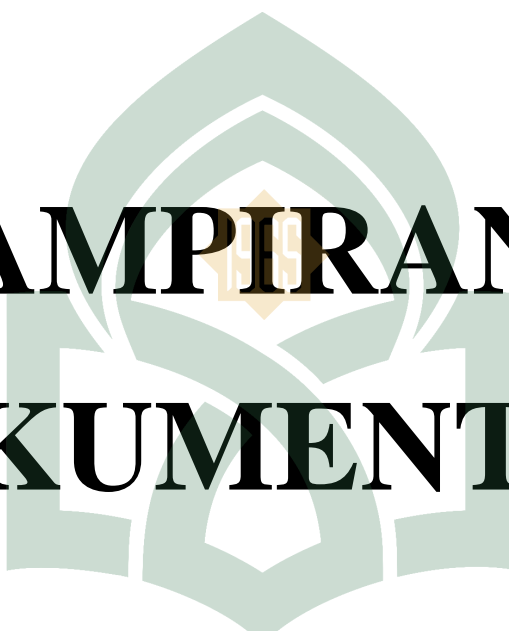
Saya selaku peneliti dalam hal ini ingin menggunakan konsep maqashid syariah (yang dalam hal ini diproksikan dengan Tahdzib al fard, Iqamah al-adl, dan Jalb al maslahah) untuk mengkaji akuntabilitas penggunaan anggaran pada dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pinrang. Proksi ini kemudian diturunkan dalam empat gambaran umum (shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah) untuk menjaga kepercayaan stakeholder.

4. Bagaimana dinas kelautan dan perikanan kabupaten pinrang menanggapi kritik dan saran atas kinerja yang mereka lakukan?
= Pertanggungjawaban yang dilakukan juga diberikan juga kepada masyarakat. proses anggarannya rmmenunggu dari usulan musrembang dari masyarakat, terus di proses di kecamamatan selanjutnya di proses di kabupaten, hasil dari kabupaten di rangkum di BKUD kemudian di bagikan kepada setiap dinas.

Informan ke 4

Saiful (Masyarakat)

1. Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dinas perikanan kabupaten pinrang yang anda ketahui?
 = Pak kadis selalu turun disini untuk mengecek kondisinya kita ini yang bergerak di bidang perikanan. Setelah itu beliau juga biasanya mengajak kami berdiskusi terkait dengan program apa yang harus di buat oleh dinas perikanan. Intinya disini kami selaku masyarakat selalu dilibatkan dalam pembuatan program di dinas perikanan
2. Apakah dinas perikanan kabupaten pinrang selalu terbuka dan berkoordinasi dengan masyarakat?
 = Pak kepala dinas kemarin memang selalu terbuka sama masyarakat. Pernah itu dia bilang sama saya ada anggaran sekian dan nanti itu mau dialokasikan untuk warga pesisir kayak nelayan yang ada disini. Beliau juga itu dulu kalau selesai rapat anggaran pasti turun ke masyarakat sosialisasi sekaligus dia sampaikan ke kami berapa anggaran untuk bidang ini dan sebagainya. Saya berharap penggantinya nanti karna yang menjabat sekarang sementara belum pernah turun ke masyarakat. saya tidak tau kenapa, apa karna dia perempuan atau karna baru pi
3. Apakah dinas perikanan kabupaten pinrang telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggarannya?
 = Itu dinas perikanan transparan sekali dek, pokoknya itu berapa anggaran yang keluar begitu juga yang disampaikan ke masyarakat, misalnya dia bilang anggaran pembibitan seratus juta dan sampai di masyarakat juga seratus juta pokoknya itu tidak pernah ada ditutup tutupi dari masyarakat
4. selama ini bagaimana model pertanggungjawaban anggaran yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pebgawasan dari pihak dinas perikanan?
 = oh jelas masa kita dikasi dana baru kita tidak diawasi. jadi begini, itu pemerintah nakasi kita anggara demikian untuk jalankan program. nanti itu kita ini masyarakat yang dikasi anggaran kita kelola dan pengelolaannya itu diawasi pengawas dari dinas perikanan. semua biaya yang dikeluarkan selama program kita catat untuk nanti dilaporkan kedinas melalui pengawas ini. kita juga tidak berani macam-macam karna kita tau ini uang negara, tapi intinya itu sudah bagus pengelolaan anggarannya dinas perikanan

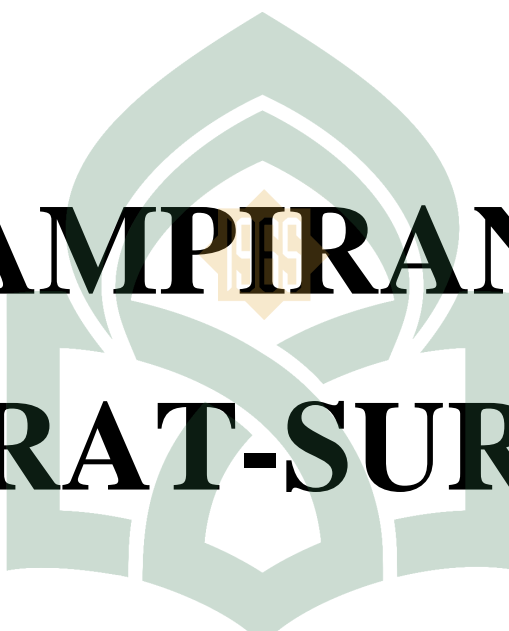


LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R





LAMPIRAN 3

SURAT-SURAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
Nomor : 0030 Tahun 2020

**PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Kartini Nim: 90400116095 tertanggal 6 Januari 2020 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Responsibilitas Penggunaan Anggaran Pemerintah berlandaskan Islamic Principles (Studi pada SKPD Di Kabupaten Pinrang)
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Mengangkat/ Menunjuk Saudara :
1. Dr. Saiful, SE., M.Si., Ak
2. Akramunnas, SE., M. Si
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 6 Januari 2020

Dekan,

PROF. DR. H. ABUSTANI ILYAS, M.Ag
NIP. 19661130 199303 1 003



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 965 TAHUN 2020**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Karlini, NIM : 90400116095
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Karlini**, NIM: **90400116095** tertanggal 10 Maret 2020 untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Juduk: **"Akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah berbasis Islamic principles (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang)"**.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal penelitian, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar proposal penelitian dan penyusunan skripsi
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
c. Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama;
6. RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Proposal penelitian dan penyusunan skripsi, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Pembimbing I : Dr. Saiful Muchlis, SE., M.Si., Ak.
Pembimbing II : Akramunnas, SE., MM.
Penguji I : Dr. Lince Bulutodang, SE., M.Si., Ak.
Penguji II : Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM.
Pelaksana : Muh. Irfan Mas'ud
2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 07 April 2020



PEMRAKARS (FAKHRIUNNISA)	KASUBAG AKADEMIK (NURMIAH MUIN, S.IP.,MM)
-----------------------------	--



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1678 TAHUN 2020**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif Kartini : NIM: 90400116095
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Meneetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|----------------------------|--|
| Ketua | : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. |
| Sekretaris | : Memen Suwandi, SE., M.Si. |
| Penguji Dirasah Islamiyah | : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. |
| Penguji Akuntansi Keuangan | : Dr. Saiful, SE., M.SA., Ak. |
| Penguji Auditing | : Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak. |
| Pelaksana | : Nurmah Muin, S.IP., MM. |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 18 Agustus 2020

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 1961130 199303 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dekan dalam Lingkungan UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Arsip

PEMRAKARSA (SITTI RIFQAH WIRANTI)	KASUBAG AKADEMIK (NURMAH MUIN, S.IP.,MM)



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2249 TAHUN 2020**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Kartini, NIM : 90400116095
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Kartini, NIM: 90400116095** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Pembimbing : Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA., Ak.
Pembimbing II : Akramunnas, SE., MM.
Penguji I : Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.
Penguji II : Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM.
Pelaksana : Nurmiah Muin, S.IP., MM.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua** : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa;
2. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 9 November 2020
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

- Tembusan :**
1. Rector UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
 2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 3. Arsip

PEMRAKARS (Fakhunnisa, SE)	KASUBAG AKADEMIK (Nurmiah Muin, S.IP.,M.M)



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2440 TAHUN 2020**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan : **Kartini**
NIM : **90400116095**
Tanggal : **17 November 2020**
Mahasiswa Jurusan : **AKUNTANSI**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Elaborasi Konsep Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)**"
- Menimbang** : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Penguji I : Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.
Penguji II : Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM.
Pembimbing I : Dr. Saifull Muchlis, SE., M.SA., Ak.
Pembimbing II : Akramunnas, SE., MM.
Pelaksana : Nurmiah Muin, S.IP, MM.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**
Pada tanggal : **18 November 2020**

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



PROF. DR. H. ABUSTANI ILYAS, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

PEMRAKARSA (FAKHRUNNISA)	KASUBAG AKADEMIK (NURMIAH MUIN, S.IP.,MM)
	9



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0311/PENELITIAN/DPMTSP/08/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-08-2020 atas nama KARTINI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0713/R/T.Teknis/DPMTSP/08/2020, Tanggal : 19-08-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0311/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/08/2020, Tanggal : 24-08-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 2. Alamat Lembaga : JL. H. M. YASIN LIMPO NO. 36 MAKASSAR
 3. Nama Peneliti : KARTINI
 4. Judul Penelitian : ELABORASI KONSEP MAQASHIDSHARIAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang)
 5. Jangka waktu Penelitian : 3 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KASUBAG KEUANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 19-02-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 24 Agustus 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**ZONA
HIJAU**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kartini atau biasa dipanggil **Nini** ialah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Ammani, Sulawesi Selatan pada tanggal 04 Juli 1999. Penulis lahir dari pasangan Syamsul dan Hamdana dan merupakan putri kedua dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan

pada tahun 2004-2010 di SDN 207 Ammani. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cempa pada tahun 2010-2013, lalu pada tahun 2013-2016 di SMKN 1 Pinrang dengan mengambil jurusan Akuntansi. Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengurus di organisasi yaitu Anggota bidang Penalaran dan Keilmuan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi UIN Alauddin Makassar dan juga menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul ***“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang).”***